LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, penyusunan Laporan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Bangka ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada Stakeholder mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Bangka disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dalam mendukung tercapainya tujuan, sasaran, kebijakan organisasi yang telah ditetapkan.

Dinas Perikanan Kabupaten Bangka akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja

tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan tujuan, sasaran, progam dan kebijakan yang telah ditetapkan

Sungailiat, Februari 2025

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Bangka,

Drs. Arman
Pembina Utama Muda
NIP. 19681028 199601 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi 1

B. Struktur Organisasi 2

C. Tugas Pokok dan Fungsi 4

D. Personalia/ Sumber Daya Manusia 9

E. Sarana dan Prasarana 10

F. Pengertian dan Tujuan LAKIN 14

G. Sistematika Penyusunan LAKIN Tahun 2024..... 14

BAB II RENCANA KINERJA OPD DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

A. Perencanaan Strategis 16

B. Tujuan 16

C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 20

B. Realisasi Anggaran 41

BAB IV PENUTUP..... 62

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Realisasi Tataran Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten BangkaTahun 2024
2. Tataran Pelaksana Kebijakan, Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024 (Konsumsi Ikan)
3. Matriks Tahun 2024.
4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024.
5. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun2024.
6. Data Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan Tahun 2024.
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perikanan

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bertanah air. Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, perlu juga dianalisa apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dalam penyajian perkembangan anggaran hendaknya dilakukan menurut program atau kegiatan pokok.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini, disusun berdasarkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh dan dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam konteks akuntabilitas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan ini merupakan instrumen bagi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka

untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya dalam laporan ini berisi gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2024, sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan beberapa kali penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka. Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melakukan Penataan kelembagaan pada pertengahan tahun 2016 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tanggal 7 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.
b. Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2022, tanggal 09 Agustus 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan TIPE A Kabupaten Bangka.

Susunan organisasi Dinas Perikanan Kab. Bangka terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Sub Bagian, 2 (dua) Kepala UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANANKABUPATEN BANGKA

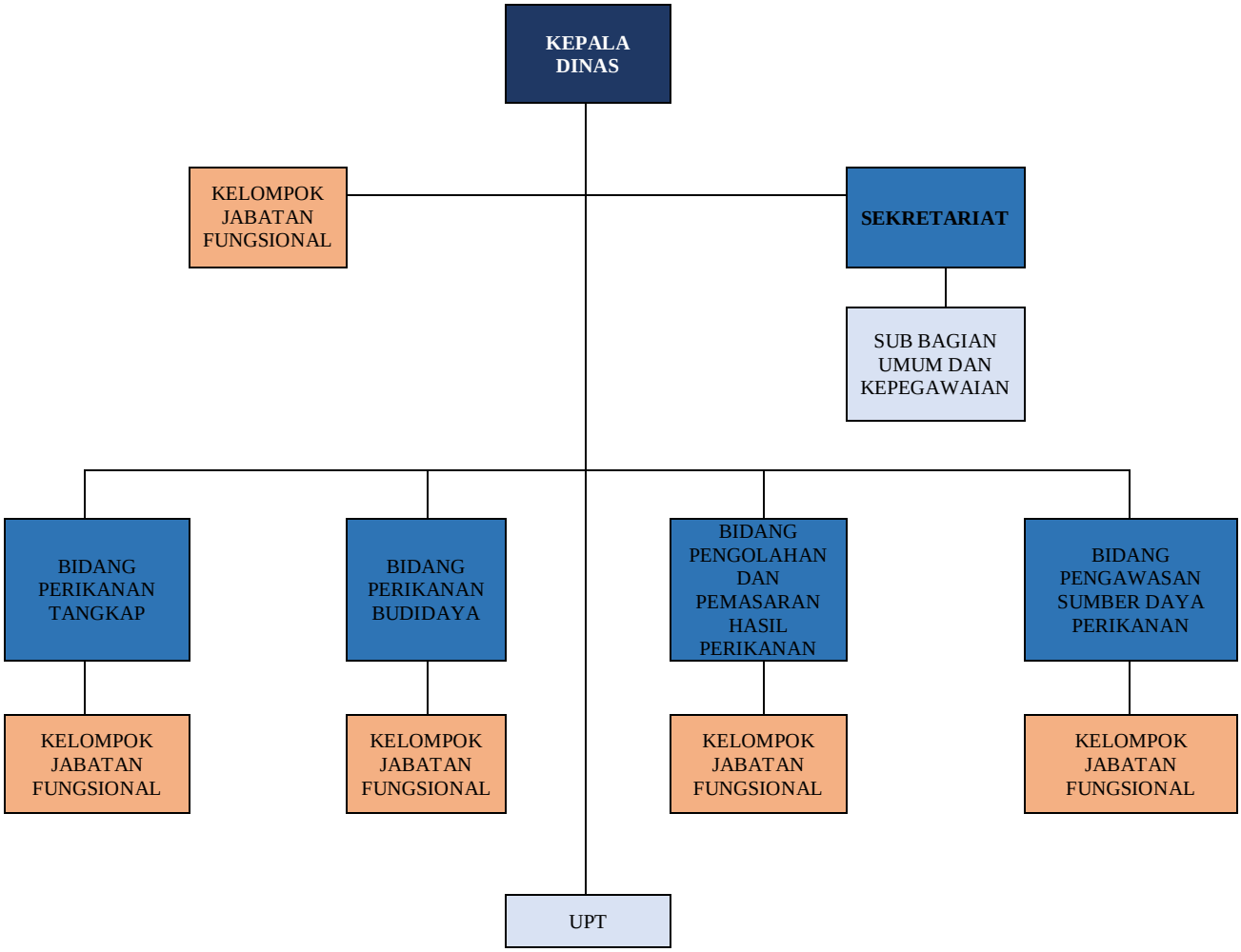

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian yakni :
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang – Bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yakni :
   a. Bidang Perikanan Tangkap
   b. Bidang Perikanan Budidaya
   c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
   d. Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan
4. UPTD yang terdiri dari 2 (dua) UPTD yaitu :
   a. UPTD TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Sungailiat
   b. UPTD BBI (Balai Benih Ikan) Sungailiat
5. Kelompok Jabatan Fungsional

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2022, tanggal 09 Agustus 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2020, maka kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

1. Dinas Perikanan Tipe A adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan.
2. Dinas Perikanan Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Dinas Perikanan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah.

c. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Dinas Perikanan Tipe A mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pembinaan UPT;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kewenangan

Dinas Perikanan Tipe A mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Raduk, Rawa, dan genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
2. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten;
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
4. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Raduk, Rawa, dan genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
5. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Raduk, Rawa, dan genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;

6. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Raduk, Rawa, dan genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
7. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
8. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
9. Penerbitan Tanda Daftar kapal bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
10. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
11. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Raduk, Rawa, dan genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
12. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengelolaan hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil;
13. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
14. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
15. Koordinasi dan Penyelenggaraan Program, Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Teknologi di Bidang Perikanan Skala Daerah;
16. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Perikanan Skala Daerah;
17. Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Terpadu Sumber Daya Perikanan Ikan dalam Wilayah Daerah;
18. Pelaksanaan Sistem Informasi Perikanan di Wilayah Daerah;
19. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bidang Perikanan di wilayah Kewenangan Daerah;
20. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Perairan Daerah;

21. Peragaan, Penyebarluasan dan Bimbingan Penerapan Teknologi Perikanan;
22. Pengelolaan dan Pemanfaatan Perikanan di Wilayah Daerah;
23. Koordinasi dan Pelaksanaan Estimasi Stok Ikan di Wilayah Perairan Kewenangan Daerah;
24. Pelaksanaan dan Koordinasi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Plasma Nutfah Sumber Daya Ikan Kewenangan Daerah;
25. Penetapan Kebijakan dan Pelaksanaan Pungutan Perikanan Kewenangan Daerah;
26. Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kelembagaan dan Ketenagakerjaan Bidang Perikanan Kewenangan Daerah;
27. Pelaksanaan Kebijakan Pembudidayaan Ikan;
28. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar;
29. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan;
30. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar;
31. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan berbahaya dan pakan ikan;
32. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
33. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
34. Penataan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
35. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
36. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk perjenis , induk dasar dan benih alam;
37. Pelaksanaan kebijakan terkait perizinan berusaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah Daerah;
38. Pelaksanaan kebijakan terkait perizinan berusaha di bidang penangkapan ikan di wilayah Daerah;

39. Pelaksanaan kebijakan terkait perizinan berusaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di wilayah Daerah;
40. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan hasil budidaya;
41. Pelaksanan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
42. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
43. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
44. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan air payau yang menjadi kewenangan Daerah;
45. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
46. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
47. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
48. Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
49. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
50. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);
51. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan di Daerah; dan
52. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

D. PERSONALIA/ SUMBER DAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 71 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan, dan pendidikan sebagai berikut : 32 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah, 3 orang Pegawai P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 36 orang tenaga honorer Pemerintah Daerah.

a. Berdasarkan Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah
I	0	0	0	0	0
II	1	1	0	1	3
III	2	2	7	12	23
IV	4	1	1	0	6
IX	0	0	0	0	3
Total					**35**

b. Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon I	0
2	Eselon II	1
3	Eselon III	5
4	Eselon IV	5
5	JFT	12
6	JFT PPPK	3
7	Non Eselon	9
	Total	**35**

c. Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata Tiga (S3)	0
2	Strata Dua (S2)	6
3	Strata Satu (S1)/ Diploma Empat (D4)	17
4	Diploma Tiga (D3)	7
5	SLTA	3
6	SLTP	2
	Total	**35**

E. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Perikanan Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

No	Kelompok Barang	Keterangan
1	Tanah	8.018 m2
2	Bangunan Tempat Kerja	9.076,76 m2
3	Kendaraan	Roda 4 (3 unit), Roda 2 (22 unit)
4	Inventaris Kantor	1 Paket

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :

1. Tanah

Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bangka : 2.000 m^2
Balai Benih Ikan Sungailiat : 4.778 m^2
TPI Rebo : 200 m^2
TPI Pesaren : 1.040 m^2

2. Bangunan Kantor

- Kantor Dinas Perikanan Kab. Bangka : 292,52 m^2

- BBI Sungailiat : 4.778 m^2

- TPI Sungailiat : 578 m^2

- TPI Rebo : 77,50 m^2

- Bangsal Pertemuan Kota Kapur : 24 m^2

- TPI Pesaren Belinyu : 92 m^2

- Tambat Labuh (Revitalisasi) Kabupaten Bangka : 9 Unit

  1. Bangunan Dermaga Tambat Labuh Kota Kapur Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat
  2. Dermaga Tambatan Labuh/Bangsal Kelurahan Batu Dinding Kecamatan Belinyu

3. Dermaga Tambatan Labuh/Bangsal Desa Penyusuk Kecamatan Belinyu
4. Dermaga Tambatan Labuh Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat
5. Dermaga Tambatan Labuh Lingkungan Kuala Kecamatan Sungailiat
6. Dermaga Tambatan Labuh Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu
7. Dermaga Tambatan Labuh Dusun Tuing Desa Maour Kecamatan Riau Silip
8. Bangunan Tambat Labuh Tambun Tulang Riding Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu
9. Bangunan Tambat Labuh Jalan Laut Lingkungan Kuala Kecamatan Sungailiat

- Bangunan UPP Perikanan Budidaya (Pemali) : 1 Unit
- Bangunan Gudang Pakan Ikan : 24 m^2
- Bangunan Musholla : 30,25 m^2
- Bangunan Kolam BBI : 2.000,95 m^2

3. Kendaraan Dinas Operasional

- Kendaraan Roda Empat : 3 Unit
- Kendaraan Roda Dua : 22 Unit

4. Inventaris/ Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari : Meubelair, peralatan komputer, serta peralatan kantor lainnya diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

F. PENGERTIAN DAN TUJUAN LAKIN

1. Pengertian

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta kekurangan atau pertanggung jawaban.

Semua instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. Akuntabilitas tersebut meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan dan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan perencanaan strategis.

2. Tujuan

- Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.
- Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIN TAHUN 2024

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan LAKIN Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, maksud dan tujuan penyusunan LAKIN serta sistematika penyusunan LAKIN.

BAB II. RENCANA KINERJA OPD DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA

Pada bab ini diuraikan tentang pernyataan penataan ruang, perencanaan pembangunan, statistik, tujuan dan indikator, strategi, kebijakan serta Rencana Kinerja Tahun 2024.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang metodologi pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2024, analisis atas pencapaian sasaran strategik, analisis atas pencapaian keuangan tahun 2024.

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan/ peluang dan ancaman/ tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dan mengakomodir aspirasi masyarakat dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

B. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Dinas Perikanan Kabupaten Bangka menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Perikanan;
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka :

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	- Meningkatkan tata kelola pemanfaatan sumber daya perikanan pengawasan dan penertiban, serta pengendalian perizinan usaha perikanan. - Meningkatkan kemampuan nelayan, pembudidaya ikan, - Mengembangkan sistem pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan. - Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan. - Meningkatkan sarana dan	**Ekonomi Biru** Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan Ekonomi Biru melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan. **Pengembangan sarana dan**	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

			prasarana perikanan untuk usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran, dan pengawasan.	**prasarana** Kebijakan ini meliputi pengembangan sarana dan prasarana untuk usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran, dan pengawasan.	
			- Meningkatkan kualitas perencanaan, seperti dengan menyusun dokumen perencanaan, kajian sumber daya, dan publikasi pembangunan.	**Kualitas perencanaan** Kebijakan ini meliputi penyusunan dokumen perencanaan, kajian sumber daya perikanan, dan publikasi/informasi pembangunan perikanan.	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perikanan

C. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2024

No	Sasaran	Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	28.555,24
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.142,60
		Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	800,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (78,70)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara indikator kinerja yang diinginkan dengan indikator kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

1.1. Meningkatnya Produksi Perikanan

1. Produksi Perikanan Tangkap

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran :

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	28.555,24	28.373,84	99,36

Rumusan : Target = Renstra 2024 -2026
Realisasi = Jumlah Produksi
Capaian = Realisasi :Target x 100

Data Produksi Perikanan Tangkap
Kabupaten Bangka Tahun 2024

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bangka

Bulan	PUD		Laut		Jumlah	
	Volume (Ton)	Nilai (Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
Triwulan I 2024	**6,73**	**551.192.100,00**	**2.791,88**	**93.108.018.750,00**	**2.798,61**	**93.659.210.850,00**
Januari 2024	2,41	194.005.000,00	681,20	22.139.130.000,00	683,61	22.333.135.000,00
Februari 2024	2,24	180.047.100,00	821,96	26.508.048.750,00	824,19	26.688.095.850,00
Maret 2024	2,08	177.140.000,00	1.288,72	44.460.840.000,00	1.290,80	44.637.980.000,00
Triwulan II 2024	**6,32**	**510.561.500,00**	**8.801,01**	**286.126.573.001,25**	**8.807,34**	**286.637.134.501,25**
April 2024	2,03	163.922.500,00	2.877,09	94.224.730.000,25	2.879,12	94.388.652.500,25
Mei 2024	2,19	176.134.000,00	3.421,57	111.200.927.000,50	3.423,76	111.377.061.000,50
Juni 2024	2,11	170.505.000,00	2.502,35	80.700.916.000,50	2.504,46	80.871.421.000,50
Triwulan III 2024	**7,09**	**572.246.500,00**	**10.477,63**	**336.690.960.900,00**	**10.484,71**	**337.263.207.400,00**
Juli 2024	2,38	192.346.500,00	3.244,91	104.648.057.250,00	3.247,29	104.840.403.750,00
Agustus 2024	2,41	194.005.000,00	3.752,41	120.076.960.000,00	3.754,82	120.270.965.000,00
September 2024	2,30	185.895.000,00	3.480,31	111.965.943.650,00	3.482,61	112.151.838.650,00
Triwulan IV 2024	**6,12**	**494.790.000,00**	**6.277,06**	**208.183.643.775,00**	**6.283,18**	**208.678.433.775,00**
Oktoober 2024	2,12	171.190.000,00	3.289,47	109.039.570.275,00	3.291,59	109.210.760.275,00

November 2024	2,01	162.609.000,00	1.932,94	64.076.961.000,00	1.934,95	64.239.570.000,00
Desember 2024	1,99	160.991.000,00	1.054,65	35.067.112.500,00	1.056,64	35.228.103.500,00
JUMLAH	**26,26**	**2.128.790.100,00**	**28.347,58**	**924.109.196.426,25**	**28.373,84**	**926.237.986.526,25**

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 produksi perikanan tangkap tidak dapat mencapai target yang telah tetapkan yaitu sebesar 28.555,24 ton, dan realisasi sebesar 28.373,84 ton dengan persentase capaian sebesar 99,36%.

- Faktor penyebab terjadinya penurunan pada jumlah produksi perikanan tangkap disebabkan karena :
  1. Sebagian nelayan melakukan bongkar hasil tangkapan di luar Bangka (Pangkal Pinang, Toboali) yang menyebabkan hasil tangkapan masuk ke dalam wilayah Pangkal Pinang dan Toboali sehingga mengurangi jumlah produksi di Kabupaten Bangka.
  2. Menurunnya aktifitas nelayan ke laut dikarenakan cuaca yang kurang baik pada tahun ini sehingga jumlah trip tidak dapat dilakukan dengan maksimal.
  3. Penyerahan bantuan peralatan sarana perikanan melalui Dana Alokasi Khusus belum dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan penyerahan di laksanakan di bulan Juli dan baru dipergunakan di bulan September.
  4. Dikarenakan pada bulan Oktober – Desember sudah memasuki musin angin barat (angin dan gelombang besar) sehingga mempengaruhi para nelayan untuk melakukan aktifitas melaut.

Dalam upaya peningkatan produksi perikanan tangkap yang lebih maksimal, perlu dilakukan optimalisasi dukungan dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat, begitu pula yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangka melalui Bidang Perikanan Tangkap dengan melakukan :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sektor perikanan yang memadai

2. Melakukan pembinaan pengendalian dan pengawasan yang baik kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB);
3. Memonitoring dan mengevaluasi bantuan yang telah diberikan kepada KUB sebagai dasar/ bahan evaluasi Dinas Perikanan untuk terus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
4. Meningkatkan SDM sektor perikanan yang berkualitas;

Kegiatan yang lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangka pada Tahun 2024 dalam upaya meningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi para nelayan dilakukan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Adapun Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap melalui dana Alokasi Khusus (DAK) dan Insentif Fiskal (IF) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Nama Penerima Bantuan (Kelompok)	Jenis Bantuan	Keterangan
1	KUB Angkup Fishing Kec. Pemali	Mesin Tempel 3,5 PK 10 Unit	(DAK)
2	KUB Berkah Mandiri Terpadu Kec. Mendo Barat	Mesin Tempel 9,8 PK 4 unit GPS 2 Unit Cool Box 2 Unit Life Jacket 12 Unit	(DAK)
3	KUB Nelayan Jaya Sentosa Kec. Mendo Barat	Mesin Tempel 9,8 PK 4 Unit	(DAK)
4	KUB Nelayan Pesona Cahaya Mandiri Kec. Mendo Barat	Mesin Tempel 9,8 PK 4 Unit	(DAK)
5	KUB Bahari Penagan I Kec. Mendo Barat	GPS 10 Unit Cool Box 10 Unit Life Jacket 12 Unit	(DAK)
6	KUB Nelayan Cinta Laut Kec. Belinyu	Mesin Tempel 9,8 PK 3 Unit Mesin Tempel 18 PK 3 Unit GPS 6 Unit Cool Box 6 Unit Life Jacket 6 Unit	(DAK)
7	KUB Nelayan Samudera Jaya Bahari Kec. Belinyu	Mesin Tempel 18 PK 3 Unit GPS 6 Unit Cool Box 6 Unit Life Jacket 6 Unit	(DAK)
8	KUB Nelayan Utara Bersatu Kec. Belinyu	Mesin Tempel 9,8 PK 1 Unit Mesin Tempel 18 PK 2 Unit GPS 6 Unit Cool Box 6 Unit Life Jacket 6 Unit	(DAK)
9	KUB Nelayan Mitra Harapan Abadi Kec. Belinyu	Mesin Tempel 9,8 PK 2 Unit Mesin Tempel 18 PK 1 Unit GPS 6 Unit Cool Box 6 Unit,	(DAK)

		Life Jacket 6 Unit	
10	KUB Nelayan Anugerah Sinar Abadi Kec. Belinyu	Mesin Tempel 9,8 PK 2 Unit Mesin Tempel 18 PK 1 Unit GPS 5 Unit Cool Box 5 Unit, Life Jacket 5 Unit	(DAK)
11	KUB Nelayan Cahaya Samudera Berjaya Kec. Belinyu	Mesin Tempel 9,8 PK 1 Unit Mesin Tempel 18 PK 2 Unit GPS 5 Unit Cool Box 5 Unit Life Jacket 5 Unit	(DAK)
12	KUB Berkah Usaha Kec. Belinyu	Mesin Tempel 9,8 PK 3 Unit Mesin Tempel 18 PK 3 Unit GPS 6 Unit Cool Box 6 Unit Life Jacket 6 Unit	(DAK)
13	KUB Nelayan Sejati Kec. Belinyu	Mesin Tempel 18 PK 3 Unit GPS 6 Unit Cool Box 6 Unit Life Jacket 6 Unit	(DAK)
14	KUB Cahaya Ufuk Timur Kec. Merawang	GPS 10 Unit Cool Box 10 Unit Life Jacket 10 Unit	(DAK)
15	KUB Sumber Rezeki Laut Kec. Merawang	Mesin Tempel 9,8 PK 8 Unit	(DAK)
16	KUB Sumber Rezeki I Kec. Merawang	Mesin Tempel 9,8 PK 8 Unit	(DAK)
17	KUB Nelayan Maju Bersama Kec. Sungailiat	GPS 9 Unit Cool Box 9 Unit Life Jacket 9 UniT	(DAK)
18	KUB Rambak Sejahtera. Kec. Sungailiat	GPS 7 Unit Cool Box 7 Unit Life Jacket 7 Unit	(DAK)
19	KUB KUB Nelayan Bahari Jaya Lestari Kec. Riau Silip	Mesin Tempel 9,8 PK 2 Unit Mesin Tempel 18 PK 3 Unit GPS 9 Unit Cool Box 9 Unit Life Jacket 9 Unit	(DAK)
20	KUB Nelayan Bersama Kec. Riau Silip	Mesin Tempel 18 PK 2 Unit GPS 3 Unit Cool Box 3 Unit Life Jacket 3 Unit	(DAK)
21	KUB Pemuda Prima Kec. Merawang	Mesin Tempel 3,5 PK 3 Unit	(DAK)
22	KUB Simbang Kuala Mapur Kec. Riau Silip	Mesin Tempel 18 PK 7 Unit GPS 11 Unit Cool Box 11 Unit Life Jacket 11 Unit	(DAK)
23	KUB Tunas Nelayan Tuing Kec. Riau Silip	Mesin Tempel 9,8 PK 3 Unit Mesin Tempel 18 PK 3 Unit	(DAK)
24	KUB Nelayan Bina Sejahtera Bersama Kec. Riau Silip	Mesin Tempel 18 PK 5 Unit GPS 9 Unit Cool Box 9 Unit Life Jacket 9 Unit	(DAK)
25	KUB Harapan Jaya Kec. Riau Silip	Mesin Tempel 18 PK 2 Unit GPS 6 Unit Cool Box 6 Unit Life Jacket 6 Unit	(DAK)
26	KUB Raja Bahari Sejahtera Kec. Sungailiat	Mesin Tempel 9,8 PK 2 Unit Mesin Tempel 18 PK 2 Unit GPS 9 Unit Cool Box 9 Unit Life Jacket 9 Unit	(DAK)
27	KUB Nelayan Lintas Samudera Kec.	Mesin Tempel 9,8 PK 6 Unit	(DAK)

	Sungailiat	GPS 9 Unit, Cool Box 9 Unit Cool Box 9 Unit, Life Jacket 9 Unit	
1	KUB Makmur Bersama Kec. Merawang	Mesin Tempel 3,5 PK 4 Unit	INSENTIF FISKAL
2	KUB Sejahtera Kec. Merawang	Mesin Tempel 3,5 PK 3 Unit	INSENTIF FISKAL
3	KUB Mandiri Kec. Merawang	Mesin Tempel 3,5 PK 4 Unit	INSENTIF FISKAL
4	KUB Air Balai Kec. Merawang	Mesin Tempel 3,5 PK 4 Unit	INSENTIF FISKAL
5	KUB Putra Mandiri Jaya Kec. Merawang	Mesin Tempel 9,8 PK 2 Unit Mesin Tempel 18 PK 2 Unit	INSENTIF FISKAL

2. Produksi Perikanan Budidaya

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran :

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.142,60	2.375,75	110,88

Rumusan : Target = Renstra 2024 -2026
Realisasi = Jumlah Produksi
Capaian = Realisasi :Target x 100

DATA PRODUKSI PERBULAN PERJENIS IKAN (KG)

KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

No.	Jenis Komoditas	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jumlah (Kg)
1	Gurame	215	170	240	100	105	80	910
2	Lele	19.241	13.748	17.475	19.144	19.320	22.766	111.694
3	Nila	2.103	2.583	1.677	545	975	837	8.720
4	Patin	9.400	9.590	8.370	8.242	10.785	12.890	59.277
5	Kerang Darah					550		550
6	Nila Salin				420	78	75	573
7	Bandeng				757	200	80	1.037
8	Udang Vaname	219.866	137.515	181.247	104.741	53.929	52.339	749.637
	Jumlah Total	250.825	163.606	209.009	133.949	85.942	89.067	**932.398**

No.	Jenis Komoditas	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (Kg)
1	Gurame	400	250	252	200	50	75	1.227
2	Lele	14.894	19.824	21.409	19.406	20.228	19.168	114.929

3	Nila	625	1.090	785	665	1.265	2.649	7.079
4	Patin	9.659	10.680	11.628	7.834	5.660	5.130	50.591
5	Kerang darah							-
6	Nila Salin		50	100	50	75	80	355
7	Bandeng	350		130	110	57	90	737
8	Udang Vaname	175.847	343.909	327.621	108 .727	219.097	93.231	1.268.432
	Jumlah Total	201.775	375.803	361.925	136.992	246.432	120.423	**1.443.350**
	JUMLAH TOTAL KESELURUHAN							**2.375.748**

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 produksi perikanan budidaya melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk target produksi tahun 2024 yaitu sebesar 2.142,60 ton dengan realisasi sebesar 2.373,75 ton sehingga persentase capaian sebesar 110,88%. Meskipun demikian berbagai upaya akan terus dilakukan pada tahun -tahun selanjutnya guna pencapaian target yang telah ditetapkan.

Salah satu upaya yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang agar indikator kinerja program tetap tercapai adalah sebagai berikut

1. Peningkatan sarana dan prasarana bagi POKDAKAN seperti pemberian bantuan benih ikan, bantuan pakan ikan, serta alat pendukung perikanan.
2. Pemanfaatan pengembangan melalui kegiatan pembenihan.
3. Pembuatan pakan mandiri dengan berbahan baku lokal.
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN);
5. Memonitoring dan mengevaluasi bantuan yang telah diberikan kepada POKDAKAN sebagai dasar/ bahan evaluasi Dinas Perikanan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pembudidayaan ikan.

Kegiatan yang lakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangka pada Tahun 2024 dalam upaya meningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi para Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) dilakukan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN).

Adapun Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) dan yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya tahun 2024 melalui dana DAK adalah sebagai berikut :

No	Nama Penerima Bantuan (Kelompok)	Jenis Bantuan	Keterangan
1.	Pokdakan Bumang Desa Kemuja Kecamatan.Mendo Barat	1. Benih Lele 2. Pakan/ Pelet Ikan Hiprovite 781 3. Pakan/ Pelet Ikan Hiprovite 781-2-sp 4. Pakan/ Pelet Ikan PF 1000 5. Pakan/ Pelet Ikan PF 800	
2.	Pokdakan Cendana Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat	1. Benih Lele 2 .Pakan/ Pelet Ikan Hiprovite 781 3. Pakan/ Pelet Ikan Hiprovite 781-2-sp 4. Pakan/ Pelet Ikan PF 1000 5. Pakan/ Pelet Ikan PF 800	

3. Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran :

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	800	1.249.09	156,14

Rumusan : Target = Renstra 2024 -2026
Realisasi = Jumlah Produksi
Capaian = Realisasi :Target x 100

Data Produksi Olahan Hasil Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024

Bulan	Jenis Kegiatan					Total Per Bulan	Total Per Triwulan	Total Per Semester	Total (Kg)
	Pengolahan Lainnya	Penggaraman/Pengeringan	Penanganan Produk Segar/Dingin	Pelumatan daging/Surimi	Fermentasi/Peragian				
Januari	2.580	9.200	22.104	61.108	1.723	96.715			1.098.131
Februari	2.521	10.259	23.950	60.683	1.774	99.187			
Maret	2.836	13.250	30.352	61.961	1.835	110.234	306.136		
April	2.583	9.400	28.100	61.100	1.728	102.911			
Mei	2.529	10.256	28.950	62.688	1.772	106.195			
Juni	2.835	11.256	29.350	61.960	1.839	107.240	316.346	622.482	
Juli	2.825	9.800	26.725	61.120	2.230	102.700			
Agustus	2.660	9.100	26.100	60.420	2.200	100.480			
September	2.393	9.080	25.874	54.316	2.155	93.818	296.998		
Oktober	2.582	4.330	13.890	43.140	1.926	65.868			
November	2.709	4.200	10.872	41.852	1.710	61.343			
Desember	1.980	2.022	9.088	37.000	1.350	51.440	178.651	475.649	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 untuk Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan melebihi target yang telah ditetapkan. yaitu sebesar 800 ton dengan realisasi sebesar 1.098.131 ton sehingga persentase capaian sebesar 156,14%.

Meskipun demikian, upaya yang akan terus dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka melalui Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan guna peningkatan jumlah produksi pengolahan hasil perikanan pada tahun- tahun selanjutnya adalah

1. Menyediakan sarana dan prasarana usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan seperti rumah produksi

2. Menyediakan data dan informasi hasil produksi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
3. Melaksanakan pembinaan, penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi
5. Merekomendasikan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
6. Melakukan pemantauan distribusi harga ikan dan pemasar produk olahan lainnya.

1.2. Ikhtisar Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	50	50	100
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaanya	Kelompok	3	3	100

Pada sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, alokasi dana yang digunakan pada tahun 2024 melalui dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga dana Insentif Fiskal (IF). Dana tersebut di gunakan untuk pengalokasian pemberian bantuan kepada para nelayan kecil

Pemberian bantuan kepada para nelayan harus melewati beberapa tahapan, mulai dari verifikasi, penetapan dan penyerahan bantuan serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan dari bantuan yang diberikan.

Bantuan yang diberikan kepada nelayan tangkap berupa 18 unit mesin tempel 3,5 PK melalui dana Insentif Fiskal, sedangkan bantuan yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu berupa mesin tempel 3,5 PK sebanyak 6 unit, mesin tempel 9,8 PK sebanyak 58 unit, mesin tempel 18 PK sebanyak 44 unit dan GPS handheld sebanyak 140 unit, Coolbox sebanyak 140 unit dan Life Jacket sebanyak 152 unit. Dengan pemberian bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat perikanan (nelayan) terutama bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Sedangkan pada sub kegiatan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil, kegiatan yang lakukan Dinas Perikanan yaitu melakukan pendampingan dan pembinaan kepada nelayan agar dapat membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Hal ini sangat berguna bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang baru untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat.

2. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Operasional Kantor UPTD TPI Sungailiat	Bulan	12	12	100

Pada sub kegiatan pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, UPTD. TPI Dinas Perikanan Kabupaten Bangka memberikan pelayanan kepada nelayan dalam beraktivitas hasil penangkapan ikan (bongkar muat ikan). Untuk kelancaran kegiatan ini, dibutuhkan biaya operasional yang dianggarkan untuk 1 (satu) tahun melalui APBD Pemerintah Kabupaten Bangka.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2	100
2	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	80	80	100

Untuk sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024, UPTD Balai Benih Ikan Sungailiat mendapatkan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa

Pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yaitu kegiatan operasional Balai Benih Ikan yang pendanaannya melalui dana APBD, UPTD Balai Benih Ikan Sungailiat mendapatkan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa yaitu berupa pengadaan calon induk (calon induk ikan mas, calon induk nila gesit, calon induk lele, calon induk nila hitam dan calon induk nila merah)

Sedangkan pada sub kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat juga berjalan dengan baik, dengan output capaian kinerja sebesar 100 %. Kegiatan pembinaan dan pemantauan terus dilakukan guna meningkatkan produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam kabupaten/Kota.

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam kabupaten/Kota.	Dokumen	1	1	100
2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam kabupaten/Kota.	Dokumen	1	1	100

Pada sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka dengan anggaran yang bersumber dari APBD yaitu melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait kewajiban penerapan standar dalam perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha serta melakukan pengawasan kegiatan berusaha mulai dengan dari penggunaan mutu benih dan induk, pakan, obat, vitamin dan probiotik sampai biosekuriti, melakukan pengawasan dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan kepada para pelaku usaha, memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk kegiatan perikanan.

Pada dua sub kegiatan pengawasan tersebut yang dilakukan di tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik , dengan output capaian kinerja sebesar 100 %.

d. Program Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Peryaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	1	1	100

Pada sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang kegiatannya dialokasikan melalui Dana APBD dan Insentif Fiskal dengan melakukan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada para penderita stunting sebanyak 250 penderita di Kabupaten Bangka dapat dilaksanakan dengan baik, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

1.3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran :

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai AKIP	Katagori	BB	BB (73,60)	100

Untuk Nilai AKIP pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

oleh Inspektorat Kabupaten Bangka memperoleh kategori BB dengan nilai sebesar 73,60.

Ikhtisar Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang Disusun	Dokumen	8	8	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	100

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Meneima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	37	37	100
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	100

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	12	12	100
2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100
3	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	4	80

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	12	12	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Dokumen	12	12	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	12	12	100

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit Mobil	3	3	100
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit Motor	26	25	96

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 tercapai 100%.

2. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

Adapun realisasi kinerja dan capaian tahun 2024 dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Capaian Kinerja					
				2023		2024		2025	
				Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	1,55	1,37				
			Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	2,80	5,22				
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			28.555,24	28.373,84	29.055,24	
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			2.142,60	2.375,75	2..142,65	
			Jumlah Produksi Hasil Perikanan			800,00	1.098	824,00	
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Dinas Perikanan	Nilai Evaluasi AKIP (Kategori)	BB	BB (73,60)	BB (78,70)	BB	BB (78,80	BB

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2023 salah satu Indikator Sasaran mencapai target dan satu Indikator Sasaran yang tidak mencapai target. Sedangka Capaian Kinerja pada tahun 2024 ada dua Indikator Sasaran yang melebihi target sedangkan satu Indikator Sasaran tidak mencapai target.

3. Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun			Realisasi Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	28.555,24	29.055,24	29.555,24	28.373,84	0,00	0,00
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.142,60	2.142,65	2.142,70	2.375,75	0,00	0,00
			Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	800	824	848	1.249,09	0	0
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Dinas Perikanan	Nilai Evaluasi AKIP (Kategori)	BB (78,70)	BB (78,80)	BB (79,00)	BB	0	0

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.

Adapun penyebab kegagalan atau penurunan kinerja yaitu :

a. Sebagian nelayan melakukan bongkar hasil tangkapan di luar Bangka (Pangkal Pinang, Toboali) yang menyebabkan hasil tangkapan masuk ke dalam wilayah Pangkal Pinang dan Toboali sehingga mengurangi jumlah produksi di Kabupaten Bangka.

b. Menurunnya aktifitas nelayan ke laut dikarenakan cuaca yang kurang baik pada tahun ini sehingga jumlah trip tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

c. Penyerahan bantuan peralatan sarana perikanan melalui Dana Alokasi Khusus belum dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan penyerahan di laksanakan di bulan Juli dan baru dipergunakan di bulan September.

d. Dikarenakan pada bulan Oktober – Desember sudah memasuki musin angin barat (angin dan gelombang besar) sehingga mempengaruhi para nelayan untuk melakukan aktifitas melaut.

Adapun penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yaitu :

a. Adanya komitmen dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bangka untuk mewujudkan sasaran dan capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka.

b. Adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Perikanan Budidaya (POKDAKAN) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Insentif Fiskal (IF) dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

d. Adanya sosialisasi, pembinaan dan pemantauan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Perikanan Budidaya (POKDAKAN) dan para pelaku usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebagai dasar dan bahan evaluasi untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan, yang dimulai dari monitoring dan mengevaluasi bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Perikanan Budidaya (POKDAKAN, pembinaan kelayakan pengolahan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI), pemantauan ketersediaan dan harga ikan di pasar serta perluasan akses pasar agar dapat mempermudah penjual hasil produksi perikanan, serta melakukan upaya pembinaan dan pengawasan dengan cara melakukan penerapan Standar Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

e. Adanya pembinaan dan pengawasan terkait dengan kewajiban penerapan standar dalam perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha serta pengawasan kegiatan berusaha yang dilakukan mulai dengan penggunaan pakan, obat, vitamin dan probiotik sampai biosekurity (penularan penyakit, pencurian dan pelepasan bahan biologis)

Sedangkan solusi yang perlu dilakukan yaitu :

a. Melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian target sasaran strategis Dinas.

b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menindaklanjuti pelaksanaan program yang mendukung sasaran kinerja
c. Melakukan identifikasi sasaran program dan kegiatan serta penyusunan kegiatan yang memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perikanan kabupaten Bangka serta melakukan peningkatan kualitas Aparatur Dinas Perikanan kabupaten Bangka.
d. Mengupayakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas bagi aparatur Dinas Perikanan kabupaten Bangka.
e. Melakukan pengusulan kembali sarana dan prasarana perikanan baik melalui DAK maupun APBN ke Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) setiap tahun;
f. Melakukan monitoring dan mengevaluasi bantuan yang telah sebagai dasar/ bahan evaluasi Dinas Perikanan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pembudidayaan ikan kepada para Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) serta terus melakukan pembinaan kelayakan pengolahan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
g. Melakukan koordinasi dengan instansi dan stake holder lain terkait ketersediaan benih sesuai dengan kebutuhkan.
h. Melakukan monitoring harga pasar secara berkala terkait ketersediaan bahan baku dan harga ikan di pasar bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta merekomendasikan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan juga menyediakan sarana dan prasarana usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan seperti rumah produksi.
i. Melakukan Pengawasan dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan kepada para pelaku usaha, memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk kegiatan perikanan, mengawasi mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan, dan bahan lainnya dan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait pencegahan dan kesehatan ikan mulai dari

penggunaan pakan, obat, vitamin dan probiotik sampai biosekurity (penularan penyakit, pencurian dan pelepasan bahan biologis)

5. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program/ kegiatan pada Renstra tahun 2024-2026 yang telah disusun merupakan program/ kegiatan untuk menunjang keberhasilan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kab. Bangka dan untuk mendukung visi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka. Jika adanya kegagalan atau belum optimalnya keberhasilan dalam mencapai target, hal tersebut dikarenakan

a. Sebagian nelayan melakukan bongkar hasil tangkapan di luar Bangka (Pangkal Pinang, Toboali) yang menyebabkan hasil tangkapan masuk ke dalam wilayah Pangkal Pinang dan Toboali sehingga mengurangi jumlah produksi di Kabupaten Bangka.
b. Menurunnya aktifitas nelayan ke laut dikarenakan cuaca yang kurang baik pada tahun ini sehingga jumlah trip tidak dapat dilakukan dengan maksimal.
c. Penyerahan bantuan peralatan sarana perikanan melalui Dana Alokasi Khusus belum dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan penyerahan di laksanakan di bulan Juli dan baru dipergunakan di bulan September.
d. Dikarenakan pada bulan Oktober – Desember sudah memasuki musin angin barat (angin dan gelombang besar) sehingga mempengaruhi para nelayan untuk melakukan aktifitas melaut.

Selain dari kendala dilapangan, hambatan yang terjadi disebabkan dengan keterbatasan anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dikarenakan rasionalisasi anggaran.

D. REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi penerimaan, pelaksanaan anggaran tidak langsung dan belanja langsung Dinas Perikanan Kabupaten Bangka untuk Tahun Anggaran 2024, meliputi sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan asli daerah dan sektor perikanan Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Tahun 2024		Capaian (%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	85.000.000	45.490.000	53,52
	Jumlah	**85.000.000**	**45.490.000**	**53,52**

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu penjualan benih ikan air tawar yang dilakukan oleh UPTD. Balai Benih Ikan Sungailiat, untuk tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebakan oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Kurangnya daya beli masyarakat terhadap pembelian bibit benih ikan di Balai Benih Ikan Sungailiat.
b. Masa indukan yang sudah tidak produktif lagi (afkir) serta
c. Debit air kolam yang kurang memadai yang disebabkan musim kemarau pada bulan Agustus – November

2. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka tahun 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. **3.762.143.545,00** terealisasi sebesar Rp. **3.686.157.486,00** atau 97,98 %, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)
		Rp	%	

	Belanja Pegawai				
	Gaji dan Tunjangan	**3.762.143.545**	**3.686.157.486**	**97,98**	**75.986.059**
-	Belanja Gaji pokok PNS	1.868.532.726	1.846.944.226	98,84	21.588.500
	Belanja Gaji Pokok PPPK	92.681.000	86.497.200	93,33	6.183.800
-	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	147.295.366	145.703.136	98,92	1.592.230
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.902.336	4.036.536	82,34	865.800
-	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	192.150.000	190.190.000	98,98	1.960.000
-	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	121.900.000	119.700.000	98,20	2.200.000
-	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.940.000	4.860.000	81,82	1.080.000
-	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.330.000	24.395.000	96,31	935.000
-	Belanja Tunjangan Beras PNS	86.614.320	85.745.280	99,00	869.040
-	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.490.000	3.910.680	87,10	579.360
-	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.446.101	27.542.286	96,82	903.815
-	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	305.208	305.208	100	0
-	Belanja Pembulatan Gaji PNS	106.061	25.969	24,48	80.092
-	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.944	944	13,59	6.000
-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	137.547.451	109.911.474	79,91	27.635.977
-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.233.776	3.391.776	64,81	1.842.000
-	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.096.034	3.800.519	92,79	295.515
-	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	202.536	184.536	91,11	18.000
-	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.839.162	11.401.564	96,30	437.598
-	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	603.584	553.584	91,72	50.000
-	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	86.100	0	0	86.100
-	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	264.000	0	0	264.000
-	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.020.000.000	1.017.057.568	99,71	2.942.432
-	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0	0	0	0
-	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.570.000	0	0	3.570.000

3. Anggaran Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Perikanan Kabupaten Bangka untuk Tahun Anggaran 2024 dari dana tersedia sebesar Rp. 5.837.606.956 terealisasi sebesar Rp 5.696.044.387 dengan realisasi fisik mencapai 97,57%.

Anggaran Belanja Langsung tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)
		Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**1.198.607.711**	**1.149.735.048**	**100**	**48.872.663**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**45.669.768**	**42.617.948**	**100**	**3.051.820**
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.076.768	36.637.948	100	1.438.820
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian inerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.593.000	5.980.000	100	1.613.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	**3.810.000**	**3.810.000**	**100**	**0**
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.810.000	3.810.000	100	0
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**7.455.000**	**7.407.750**	**100**	**47.250**
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepagawaian	7.455.000	7.407.750	100	47.250
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**226.965.109**	**213.771.594**	**100**	**13.193.515**
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.920.109	195.868.494	100	13.051.615
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.995.000	4.995.000	100	0
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.050.000	12.908.100	100	141.900
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**24.143.776**	**23.850.000**	**100**	**293.766**
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.143.766	23.850.000	100	293.766
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**753.583.484**	**729.738.032**	**100**	**23.845.452**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	622.083.314	613.677.000	100	8.406.314
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.249.681	55.437.632	100	13.812.049
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.250.489	60.623.400	100	1.627.089
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**136.980.574**	**128.539.724**	**100**	**8.440.850**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.320.574	114.689.824	100	7.630.750
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.660.000	13.849.900	100	810.100
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	**3.781.144.894**	**3.723.815.450**	**100**	**57.329.444**
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**3.699.765.000**	**3.646.362.850**	100	**53.402.150**
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.687.555.000	3.634.392.850	100	53.162.150
Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	12.210.000	11.970.000	98,36	240.000
Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**81.379.894**	**77.452.600**	**100**	**3.927.294**
Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	81.379.894	77.452.600	100	3.927.294
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	**753.040.361**	**733.698.889**	**100**	**19.341.472**
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**753.040.361**	**733.698.889**	**100**	**19.341.472**
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	722.590.351	703.274.009	100	19.316.352
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30.450.000	30.424.880	100	25.120
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	**13.010.000**	**13.010.000**	**100**	**0**
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**13.010.000**	**13.010.000**	**100**	**0**
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4.290.000	4.920.000	100	0
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	8.720.000	8.720.000	100	0
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**91.804.000**	**75.785.000**	**90,05**	**16.019.000**
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**91.804.000**	**75.785.000**	**90,05**	**16.019.000**
Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada	91.804.000	75.785.000	90,05	16.019.000

Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				

GAMBARAN KINERJA PADA BIDANG DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

Gambaran kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. UPTD BBI SUNGAILIAT

BBI merupakan sarana pemerintah untuk menghasilkan benih ikan dan untuk membina usaha budidaya ikan rakyat dalam rangka peningkatan produksi perikanan

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Sungailiat merupakan salah satu UPTD yang terdapat di Dinas Perikanan Kabupaten Bangka. Keberadaan UPTD BBI Sungailiat sangat berpengaruh pada pemasukan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2024 Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Sungailiat mendapatkan bantuan Belanja Modal Ikan Budidaya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa Calon Induk Ikan Mas sebanyak 24 Ekor, Calon Induk Ikan Nila Gesit sebanyak 150 ekor, Calon Induk Lele sebanyak 90 ekor, Calon Induk Nila Hitam sebanyak 450 ekor dan Calon Induk Nila Merah sebanyak 400 ekor.

Dengan bantuan pengadaan calon induk ikan tersebut di harapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam usaha pembenihan serta menghasilkan benih yang berkualitas baik.

- Pengadaan Calon Induk Ikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 pada UPTD BBI Sungailiat

2. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap merupakan salah satu Bidang yang terdapat pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka yang mempunyai Tugas Membantu Kepala Dinas Dalam Menyiapkan Perumusan Kebijakan Operasional, Mengoordinasikan, Melaksanakan Dan Mengendalikan Serta Membina Pelaksanaan Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, Sarana Prasarana Perikanan Tangkap, Dan Kelembagaan Nelayan.

Pada Tahun 2024 Bidang Perikanan Tangkap terus melakukan kegiatan secara maksimal dalam upaya pencapaian target kinerja, dengan alokasi dana melalui Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Insentif Fiskal di harapkan melalui dana tersebut mampu meningkatkan kinerja dan pencapaian kinerja secara maksimal.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Perikanan Tangkap pada tahun 2024 adalah melakukan pemberian bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) serta melakukan Pembinaan kepada para nelayan dalam pembentukan kelompok baru sebagai salah satu cara pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dalam upaya peningkatan produksi hasil perikanan.

Kegiatan yang dilakukan sebagai pendukung sasaran dan indikator dalam rangka pencapaian kinerja peningkatan produksi perikanan pada Bidang Perikanan Tangkap adalah

- Rapat dengan Penyuluh Perikanan

❖ Verifikasi KUB

❖ Penyerahan Bantuan Sarana Perikanan oleh PJ. Bupati Bangka

❖ Penyerahan Bantuan Sarana ke KUB

❖ Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan

3. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan pengembangan usaha perikanan budidaya, sarana prasarana perikanan budidaya, dan tata kelola pembudidayaan ikan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja pada Bidang Perikanan Budidaya pada tahun 2024 yang alokasi dananya melalui Dana APBD, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di harapkan mampu meningkatkan kinerja dan pencapaian kinerja secara maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Perikanan Budidaya pada tahun 2024 yaitu memberikan bantuan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) berupa benih lele beserta pakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta melakukan pembinaan dan pemantauan hasil produksi budidaya ikan dalam upaya peningkatan produksi hasil perikanan yang lebih maksimal.

Kegiatan pendukung sasaran dan indikator yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja peningkatan produksi perikanan pada Bidang Perikanan Budidaya :

❖ Pembinaan dan Pemantauan Kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)

❖ Pemberian Bantuan Benih Ikan Lele melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024

4. Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap, Pengawasan Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan, dan Pembinaan Tindak Pidana Perikanan.

Kegiatan yang dilakukan Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan kewajiban penerapan standar dalam perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Melakukan pengawasan kegiatan berusaha mulai dengan penggunaan pakan, obat, vitamin dan probiotik sampai biosekuriti yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Obat Ikan..

Berikut dokumentasi kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja peningkatan produksi perikanan pada Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan :

❖ **Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan**

Pengecekan Pakan, Obat, Vitamin

Pengecekan Administrasi Perizinan

Serah terima Berita Acara Pengawasan

Survei Lokasi Pembesaran Crustacea Air Payau

❖ **Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap**

Koordinasi dengan Desa Puding Kec. Puding Besar

Survei lokasi perairan darat
Desa Puding Kec. Puding Besar

Koordinasi dengan Desa Nibung
Kec. Puding Besar

Survei lokasi perairan darat
Desa Nibung Kec. Puding Besar

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan bina mutu dan diversifikasi produk, sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Promosi dan Logistik.

Dalam upaya pencapaian target kinerja pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada tahun 2024 yang dialokasikan melalui Dana APBD dan Insentif Fiskal di harapkan mampu meningkatkan kinerja dan pencapaian kinerja secara maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yaitu melakukan kegiatan yang mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan untuk menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi yang lebih tinggi untuk kesejahteraan para pelaku usaha dan juga para penerima manfaat.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran dan indikator dalam rangka pencapaian target kinerja dalam upaya peningkatan jumlah produksi pengolahan hasil perikanan oleh Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah

❖ Survey harga ikan di pasar (Pemasar)

❖ Monitoring Unit Pengolahan Ikan (UPI)

- Penyerahan Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Abon Ikan Untuk Anak-Anak Penyintas Stunting) melalui dana Insentif Fiskal (IF) Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024 dilihat dari pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	28.555,24	28.373,84	99,36
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	2.142,60	2.375,75	110,88
		Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	800,00	1.098.131	156,14
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (78,70)	BB	100

2. Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah:

a. Adanya komitmen dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bangka untuk mewujudkan sasaran dan capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka.

b. Adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Perikanan Budidaya (POKDAKAN) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Insentif Fiskal (IF) dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
d. Adanya sosialisasi, pembinaan dan pemantauan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Perikanan Budidaya (POKDAKAN) dan para pelaku usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebagai dasar dan bahan evaluasi untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan, yang dimulai dari monitoring dan mengevaluasi bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Perikanan Budidaya (POKDAKAN, pembinaan kelayakan pengolahan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI), pemantauan ketersediaan dan harga ikan di pasar serta perluasan akses pasar agar dapat mempermudah penjual hasil produksi perikanan.
e. Adanya pembinaan dan pengawasan terkait dengan kewajiban penerapan standar dalam perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha serta pengawasan kegiatan berusaha yang dilakukan mulai dengan penggunaan pakan, obat, vitamin dan probiotik sampai biosekurity (penularan penyakit, pencurian dan pelepasan bahan biologis)

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka pada tahun 2024 dalam upaya pencapaian target sasaran kinerja sudah dilakukan secara maksimal, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan baik yang disebabkan dari kendala teknis maupun keuangan yang sebabkan adanya rasionalisasi anggaran.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk tahun selanjutnya adalah

a. Melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian target sasaran strategis Dinas.

b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menindaklanjuti pelaksanaan Program yang mendukung sasaran.
c. Melakukan identifikasi sasaran program dan kegiatan serta penyusunan kegiatan yang memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perikanan kabupaten Bangka serta melakukan peningkatan kualitas Aparatur Dinas Perikanan kabupaten Bangka.
d. Mengupayakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas bagi aparatur Dinas Perikanan kabupaten Bangka.
e. Melakukan pengusulan kembali sarana dan prasarana perikanan baik melalui DAK maupun APBN ke Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) setiap tahun;
f. Melakukan monitoring dan mengevaluasi bantuan yang telah sebagai dasar/ bahan evaluasi Dinas Perikanan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pembudidayaan ikan kepada para Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) serta terus melakukan pembinaan kelayakan pengolahan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi
g. Melakukan koordinasi dengan instansi dan stake holder lain terkait ketersediaan benih sesuai dengan kebutuhkan.
h. Melakukan monitoring harga pasar secara berkala terkait ketersediaan bahan baku dan harga ikan di pasar bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta merekomendasikan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan juga menyediakan sarana dan prasarana usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan seperti rumah produksi.
i. Melakukan Pengawasan dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan kepada para pelaku usaha, memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk kegiatan perikanan, mengawasi mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan, dan bahan lainnya dan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait pencegahan dan kesehatan ikan mulai dari

penggunaan pakan, obat, vitamin dan probiotik sampai biosekurity (penularan penyakit, pencurian dan pelepasan bahan biologis)

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun sebagai bahan evaluasi atas capaian kinerja organisasi dan langkah dalam meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

Sungailiat, Februari 2025

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Bangka,

Drs. Arman
Pembina Utama Muda
NIP. 19681028 199601 1 001

LAMPIRAN I

Laporan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tahun 2024

REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa					
		Meningkatnya Produksi Perikanan	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**Ton**	**28,555.24**	**28,373.24**	**99.36**
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	**Ton**	**2,142.60**	**2,375.75**	**110.88**
			Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	**Ton**	**800,00**	**1,249.09**	**156.14**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Perikanan	**Nilai Evaluasi AKIP Dinperkan**	**Kategori/ Nilai**	**BB (78,70)**	**BB**	**BB**
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah**	Nilai	**28.15**	**28.15**	**100**
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai	**10.70**	**10.70**	**100**
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI**	Persentase	**0.00**	**0.00**	**0**
		Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	Indeks	**72.10**	**72.10**	**100**
		Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	**Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah**	Indeks	**4.00**	**4.00**	**100**
		Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	**Persentase BMD Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik**	Indeks	**60.45**	**60.45**	**100**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar**	**Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar**	**Persentase**	**100**	**100.00**	**100**
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	**Persentase**	**100**	**100.00**	**100**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Dokumen	8	8	100

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai Standar (%)**	**Persentase**	**100**	**100.00**	**100**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	37	37	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai**	**Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap**	**Persentase**	**100**	**50.00**	**50**
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**Persentase**	**100**	**0.00**	**0**
		Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**Persentase**	**10.81**	**0.00**	**0**
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0.00	0
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**100.00**	**100**
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja**	**Persentase penambahan aset perangkat daerah**	**Persentase**	**71.86**	**57.49**	**80**
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	5	4	80

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah**	**Persentase**	**81.78**	**81.78**	**100**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**Persentase**	**27.00**	**25.00**	**93**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	25	93
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38	38	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Meningkatnya Pelayanan Perikanan Tangkap**	**Persentase Nelayan yang Dilayani**	**Persentase**	**82.12**	**82.12**	**100**
		Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku Perikanan Tangkap	**Persentase Pelaku Perikanan Tangkap yang Terlatih**	**Persentase**	**1.20**	**1.20**	**100**
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Kompetensi Nelayan**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Perikanan Tangkap**	**Persentase**	**1.20**	**1.20**	**100**
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	Orang	50	50	100
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Perikanan Tangkap**	**Persentase KUB yang Terbentuk (%)**	**Persentase**	**0.77**	**0.77**	**100**
			Persentase KUB yang Dibina (%)	**Persentase**	**100**	**100**	**100**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	3	3	100
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Meningkatnya Layanan Perizinan/ Operasional Perikanan Tangkap**	**Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Terlayani (%)**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**
	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	12	12	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Meningkatnya Sarana dan prasarana Perikanan Budidaya**	**Persentase Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya yang diadakan (%)**	**Persentase**	**9.62**	**9.62**	**100**

		Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku Perikanan Budidaya	**Persentase Pelaku Perikanan Budidaya yang Terlatih (%)**	**Persentase**	**25.42**	**25.42**	**100**
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Meningkatnya Prasarana Perikanan Budidaya**	**Persentase Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perikanan Budidaya (%)**	**Persentase**	**6.78**	**6.78**	**100**
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2	100
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Perikanan Budidaya**	**Persentase pembudidaya ikan yang Dibina (%)**	**Persentase**	**1.69**	**1.69**	**100**
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase	80	80	100
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap**	**Persentase Usaha Perikanan Tangkap yang Diawasi**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**
		Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Perikanan Budidaya	**Persentase Usaha Perikanan bidang Pembudidaya ikan yang Diawasi**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**
	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pengawasan Perikanan Tangkap**	**Persentase Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Taat Aturan (%)**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**
		Meningkatnya Pengawasan Perikanan Budidaya	**Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budidaya yang Taat Aturan (%)**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Meningkatnya Kompetensi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan**	**Persentase Pelaku Usaha/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Terlatih (%)**	**Persentase**	**5**	**5**	**100**
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Meningkatnya Kompetensi Pengolah dan Pemasar**	**Persentase Pengolah dan Pemasar yang Telah Mengikuti Pelatihan (%)**	**Persentase**	**0.05**	**0.05**	**100**

	'Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit usaha	1	1	100

LAMPIRAN II

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perikanan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi
Rumus	:	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) = 30.749,59 Ton
Keterangan	:	▪ Sumber data utama menggunakan One Data KPP ▪ Apabila data dari One Data KKP belum tersedia atau belum terupdate, dapat menggunakan data riil dari Perangkat Daerah yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- **Penjelasan IKK Output**

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	1)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang Sebanyak 6.831 RTP	Ada

	2)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{1}{3}$ **x 100%**	Ada
	3)	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Tidak ada	Ada

	4)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	- Pembentukan kelompok baru sebanyak 3 POKDAKAN - Perubahan kelompok sebanyak 3 POKDAKAN	Ada

	5)	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	- Jumlah benih budidaya air tawar sebanyak 5.022.865 ekor (sumber : UPTD BBI Sungailiat) - Jumlah benih budidaya air tawar sebanyak 169.973.300 ekor (sumber : Unit Pembenihan Rakyat)	Ada

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
A.	Urusan Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Ada, sebanyak 6.831 RTP	Dinas Perikanan	Data Dukung Terlampiran
		Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional	$\frac{1}{3}$ **x 100%**	Dinas Perikanan	Data Dukung Terlampir
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaa n ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Tidak Ada	Dinas Perikanan	Data Dukung Terlampir
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyul uhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan	1. Pembentukan kelompok baru sebanyak 3 POKDAKAN 2. Perubahan kelompok sebanyak 3 POKDAKAN .	Dinas Perikanan	Data Dukung Terlampir

		akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)			
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	1.Jumlah benih budidaya air tawar sebanyak 5.022.865 ekor (sumber : UPTD BBI Sungailiat) 2. Jumlah benih budidaya air tawar sebanyak 169.973.300 ekor (sumber : Unit Pembenihan Rakyat)	Dinas Perikanan	Data Dukung Terlampir

Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
A.	Urusan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	30.749,59 Ton	Dinas Perikanan	Data Dukung Terlampir

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

NO	URUSAN	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Perikanan	1. Produksi Perikanan	Jumlah Produksi ikan (Ton) ---------- x 100 % Target Daerah (Ton)	30.749,59 ---------- x 100 % 30.697,84	100,17	%
		2. Konsumsi Ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) ---------- x 100 % Target Daerah (Kg)	21.217.216 ---------- x 100 % 20.955.750	101,25	Perhitungan Target Daerah = Target Konsumsi Ikan Per Kapita x Jumlah Penduduk = 62,50 x 335.292 = 20.955.750
		3. Konsumsi Ikan Per Kapita	Jumlah Konsumsi Ikan ---------- Kg Jumlah Penduduk	21.217.216 ---------- Kg 335.292,00	63,28	Kg
			Jumlah Konsumsi Ikan Per Kapita ---------- Kg Target Konsumsi Ikan Per Kapita	63,28 ------- x 100 % 62,50	101,25	%

TARGET KONSUMSI IKAN PERKAPITA

TARGET KONSUMSI IKAN PER KAPITA		
2024	**2025**	**2026**
62,50	63	63,50

LAMPIRAN III

Matrik Tahun 2024

MATRIK 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
A	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	78,7	73,6		**Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					
			8 Dokumen	8 Dokumen	100		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	38.076.768	36.637.948	96,22

			4 Dokumen	4 Dokumen	100			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.593.000	5.980.000	78,76
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
			37 orang/bulan	37 orang/bulan	100			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.762.143.545	3.686.157.486	97,98
			12 Dokumen	12 Dokumen	100			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.810.000	3.810.000	100
							Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah				

			1 paket	1 paket	100			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
			12 Dokumen	12 Dokumen	100		**Administrasi Umum Perangkat daerah**	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.455.000	7.407.750	99,37
			12 Laporan	12 Laporan	100			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.920.109	195.868.494	93,75
			12 Dokumen	12 Dokumen	100			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.995.000	4.995.000	100

			12 Dokumen	12 Dokumen	100			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.050.000	12.908.100	98,91
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			5 unit	4 unit	80			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.143.766	23.850.000	98.78
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			12 Laporan	12 Laporan	100			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	622.083.314	613.677.000	98,65

			12 Laporan	12 Laporan	100			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	69.249.681	55.437.632	80,05
			12 Laporan	12 Laporan	100			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.250.489	60.623.400	97,39
			27 Unit	25 Unit	92,6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.320.574	114.689.824	93,76
			38 Unit	38 Unit	100			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.660.000	13.849.900	94,47

B	**Meningkatnya Produksi Perikanan**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**28.555,24**	**28.373,24**	**95,86**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**				
			50 orang	50 orang	100			**Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil**	3.687.555.000	3.634.392.850	98,56
			3 kelompok	3 kelompok	100			**Pelaksanaan fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil**	12.210.000	11.970.000	98,03
							Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				

			12 layanan	12 layanan	100			**Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	81.379.894	77.452.600	95,17
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	**2.142,60**	**2.375,75**	**110,88**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**				
			2 unit	2 unit	100			**Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	722.590.361	703.274.009	97,33
			8 unit	8 unit	100			**Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat**	30.450.000	30.424.880	99,92

							Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					
			35 pelaku usaha	35 pelaku usaha	100			**Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	4.290.000	4.290.000	100	

			25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	100			**Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	8.720.000	8.720.000	100
		Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	**800**	**1.249.091**	**156,14**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**				

			1 unit usaha	1 unit usaha	100			**Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	91.804.000	75.785.000	82,55
									9.599.750.501,00	**9.382.201.873,00**	**97,73**

LAMPIRAN IV

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Dinas Perikanan Kabupaten Bangka
Tahun 2024

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2024

INSTANSI : DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA

NO.	SASARAN		SATUAN	TARGET	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET
	U R A I A N	INDIKATOR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	38.076.768	36.637.948	96,22	
		Out Put :					
		- Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang Disusun	Dokumen	8	8	100,00	
		Out Come :					
		- Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	%	100	100	100	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	7.593.000	5.980.000	78,76	
		Out Put :					
		- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100,00	
		Out Come :					
		- Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar.	%	100	100	100	

		-					
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	3.762.143.545	3.686.157.486	97,98	
		Out Put :					
		- Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	37	37	100,00	
		Out Come :					
		- Persentase laporan keuangan daerah yang sesuai standar	%	100	100	100	
4	Pelaksanaa Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	3.810.000	3.810.000	100	
		Out Put :					
		- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00	
		Out Come :					
		- Persentase laporan keuangan daerah yang sesuai standar	%	100	100	100	
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	0	0	0	
		Out Put :					
		- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100	
		Out Come :					
		- Persentase pegawai menggunakan atribut lengkap	%	0	0	0	

6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	7.455.000	7.407.750	99,37	
		Out Put :					
		- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	100	
		Out Come :					
		- Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepagawaian	%	100	100	100	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	208.920.109	195.868.494	93,75	
		Out Put :					
		- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	
		Out Come :					
		- Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	%	100	100	100	
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	4.995.000	4.995.000	100,00	
		Out Put :					
		- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100	
		Out Come :					
		- Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100	
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	13.050.000	12.908.100	98.91	
		Out Put :					

		- Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100	
		Out Come :					
		- Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100	
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	24.143.766	23.850.000	98,78	
		Out Put :					
		- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disedialkan	unit	5	4	80	
		Out Come :					
		- Persentase penambahan aset perangkat daerah	%	100	100	100	
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	622.083.314	613.677.000	98,65	
		Out Put :					
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100	
		Out Come :					
		- Persentase pemenuhan layanan jasa penujang di perangkat daerah	%	100	100	100	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	69.249.681	55.437.632	80,05	
		Out Put :					
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	1	100	
		Out Come :					
		- Persentase pemenuhan layanan jasa penujang di perangkat daerah	%	100	100	100	

13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	62.250.489	60.623.400	97,39	
		Out Put :					
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	
		Out Come :					
		- Persentase pemenuhan layanan jasa penujang di perangkat daerah	%	100	100	100	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	122.320.574	114.689.824	93,76	
		Out Put :					
		- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	27	25	92,59	
		Out Come :					
		- Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	100	100	100	
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	14.660.000	13.849.900	94,47	
		Out Put :					
		- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	Unit	38	38	100	
		Out Come :					
		- Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	100	100	100	
16	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	3.687.555.000	3.634.392.850	98,56	
		Out Put :					

		- Jumlah Nelayan Kecil Yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	50	50	100	
		Out Come :					
		- Persentase nelayan/KUB yang mendapatkan bantuan pendanaan/pembiayaan, kemitraan usaha	%	0,03	0,03	100	
17	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Ikan Kecil	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	12.210.000	12.210.000	98,03	
		Out Put :					
		- Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	3	3	100	
		Out Come :					
		- Persentase KUB yang dibina	%	100	100	100	
		Persentase KUB yang dibentuk	%	0,77	0,77	100	
18	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	81.379.894	77.452.600	95,17	
		Out Put :					
		- Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	12	12	100	
		Out Come :					
		- Persentase plaku usaha perikanan tangkap yang terlayani	%	100	100	100	
19	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	722.590.361	703.274.009	97,33	
		Out Put :					
		- Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2	100	
		Out Come :					

		- Persentase pembudidaya ikan yang mendapatkan bingtuan prasarana perikanan budidaya	%	6,78	6,78	100	
20	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	***Input :***					
		- Dana yang dibutuhkan	Rp	30.450.000	30.242.880	99,92	
		Out Put :					
		- Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	80	80	100	
		Out Come : Persentase pembudidaya ikan yang dibina	%	1,69	1,69	100	
21	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat iusahakan Dalam Kabupaten/Kota	***Input :*** - Dana yang dibutuhkan	Rp	4.290.000	4.290.000	100	
		Out Put : - Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat iusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	
		Out Come : - Persentase pelaku usaha perikanan tangkap yang taat aturan	%	100	100	100	
22	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan	***Input :*** - Dana yang dibutuhkan	Rp	8.720.000	8.720.000	100	

	Air Lainnya yang dapat iusahakan Dalam Kabupaten/Kota	***Out Put :*** - Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat iusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	
		Out Come : - Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang taat aturan	%	100	100	100	
23	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	***Input :*** - Dana yang dibutuhkan	Rp	91.804.000	75.785.000	82,55	
		Out Put : - Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan sesuainskala usaha dan risiko	Unit usaha	1	1	100	
		- ***Out Come :*** Persentase pengolah dan pemasar yang telah mengikuti pelatihan	%	0,05	0,05	100	

LAMPIRAN V

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
Dinas Perikanan Kabupaten Bangka
Tahun 2024

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2024

NO.	VISI	MISI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)	KET
				U R A I A N	INDIKATOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- -					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	***Input :*** - Dana yang dibutuhkan ***Out Put :*** - Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang Disusun ***Out Come :*** - Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	Rp Dokumen %	38.076.768 8 100	36.637.948 8 100	96,22 100,00 100	

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	***Input :***				
					- Dana yang dibutuhkan	Rp	7.593.000	5.980.000	78,76
					Out Put :				
					- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	100,00
					Out Come :				
					- Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar.	%	100	100	100
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	***Input :***				
					- Dana yang dibutuhkan	Rp	3.762.143.545	3.686.157.486	97,98
					Out Put :				
					- Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/bulan	37	37	100,00
					Out Come :				
					- Persentase laporan keuangan daerah yang sesuai standar	%	100	100	100

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaa Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	***Input :***				
					- Dana yang dibutuhkan	Rp	3.810.000	3.810.000	100
					Out Put :				
					- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00
					Out Come :				
					- Persentase laporan keuangan daerah yang sesuai standar	%	100	100	100
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	***Input :***				
					- Dana yang dibutuhkan	Rp	0	0	0
					Out Put :				
					- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	0
					Out Come :				
					- Persentase pegawai menggunakan atribut lengkap	%	100	100	100
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	***Input :***				
					- Dana yang dibutuhkan	Rp	7.455.000	7.407.750	99,37
					Out Put :				
					- Jumlah Dokumen Pendataan	Dokumen	12	12	100

					dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ***Out Come :*** - Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepagawaian	% 100	100 100	100 100
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	***Input :*** - Dana yang dibutuhkan ***Out Put :*** - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ***Out Come :*** - Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	Rp Laporan % 100	208.920.109 12 100	195.868.494 12 100	93,75 100 100
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	***Input :*** - Dana yang dibutuhkan ***Out Put :*** - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp Dokumen 12	4.995.000 12	4.995.000 12	100,00 100

					Out Come : - Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	***Input :*** - Dana yang dibutuhkan ***Out Put :*** - Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ***Out Come :*** - Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	Rp Dokumen %	13.050.000 12 100	12.908.100 12 100	98.91 100 100
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Input :*** - Dana yang dibutuhkan ***Out Put :*** - Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan ***Out Come :*** - Persentase penambahan aset perangkat daerah	Rp Unit %	24.143.766 5 100	23.850.000 4 100	98,78 80 100

			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	***Input :*** - Dana yang dibutuhkan ***Out Put :*** - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ***Out Come :*** - Persentase pemenuhan layanan jasa penujang di perangkat daerah	Rp Laporan %	622.083.314 1 100	613.677.000 1 100	98,65 100 100	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	***Input :*** - Dana yang dibutuhkan ***Out Put :*** - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan ***Out Come :*** - Persentase pemenuhan layanan jasa penujang di perangkat daerah	Rp Laporan %	69.249.681 1 100	55.437.632 1 100	74,11 100 100	
				Penyediaan Jasa	***Input :***					

			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Umum kantor	- Dana yang dibutuhkan	Rp	62.250.489	60.623.400	97,39	
					Out Put :					
					- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	
					Out Come :					
					- Persentase pemenuhan layanan jasa penujang di perangkat daerah	%	100	100	100	
					-					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	***Input :***					
					- Dana yang dibutuhkan	Rp	122.320.574	114.689.824	93,76	
					- ***Out Put :***					
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	27	25	92,59	
					- ***Out Come :***					
					- Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	100	100	100	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	***Input :***					
					- Dana yang dibutuhkan	Rp	14.660.000	13.849.900	94,47	
					Out Put :					
					- Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	38	38	100	

					Lainnya yang di pelihara ***Out Come :*** - Persentase barang milik daerah yang dipelihara	% 100	100 100	100 100	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	***Input :*** - Dana yang dibutuhkan ***Out Put :*** - Jumlah Nelayan Kecil Yang Meningkat Kapasitasnya ***Out Come :*** - Persentase nelayan/KUB yang mendapatkan bantuan pendanaan/pembiayaan, kemitraan usaha	Rp Orang %	3.687.555.000 50 0,03	3.634.392.850 50 0,03	98,56 100 100

				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	***Input :***				
					- Dana yang dibutuhkan	Rp	12.210.000	12.210.000	98,03
					Out Put :				
					- Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	3	3	100
					Out Come :				
					- Persentase KUB yang dibina	%	100	100	100
					- Persentase KUB yang dibentuk	%	0,77	0,77	100
			Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		-				
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	***Input :***				
					- Dana yang dibutuhkan	Rp	81.379.894	77.452.600	95,17
					Out Put :				
					- Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	12	12	100
					Out Come :				
					- Persentase plaku usaha perikanan tangkap yang terlayani	%	100	100	100

			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya **Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		-					
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Input :*** - Dana yang dibutuhkan ***Out Put :*** - Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ***Out Come :*** - Persentase pembudidaya ikan yang mendapatkan bingtuan prasarana perikanan budidaya	Rp Unit %	722.590.361 2 6,78	703.274.009 2 6,78	97,33 100 100
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	***Input :*** - Dana yang dibutuhkan ***Out Put :*** - Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Rp Orang	30.450.000 80	30.242.880 80	99,92 100

					Out Come : - Persentase pembudidaya ikan yang dibina	%	1,69	1,69	100	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KegiatanPengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat iusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat iusahakan Dalam Kabupaten/Kota	***Input :*** - Dana yang dibutuhkan	Rp	4.290.000	4.290.000	100	
					Out Put : - Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat iusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	
					Out Come :					

					- Persentase pelaku usaha perikanan tangkap yang taat aturan	%	100	100	100	
				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat iusahakan Dalam Kabupaten/Kota	***Input :*** - Dana yang dibutuhkan	Rp	8.720.000	8.720.000	100	
					Out Put : - Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat iusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		***Out Come :*** - Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang taat aturan	%	100	100	100	

			Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	***Input :*** Dana yang dibutuhkan ***Out Put :*** - Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan - terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan sesuainskala usaha dan risiko ***Out Come :*** - Persentase pengolah dan pemasar yang telah mengikuti pelatihan	Rp Unit usaha %	91.804.000 1 0,05	75.785.000 1 0,05	82,55 100 100	

LAMPIRAN VI

Data Sarana dan Prasarana
Dinas Perikanan Kabupaten Bangka
Tahun 2024

DATA SARANA DAN PRASARANA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

No.	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik (Unit)	Rusak (Unit)	Rusak Berat (Unit)
1	Bangunan Gedung Kantor	1	1	-	-
2	Kantor TPI Sungailiat	1	1	-	-
3	Bangunan BBI	1	1	-	-
4	Bangunan Gedung TPI Pesaren	1	1	-	-
5	Bangunan Gedung TPI Rebo	1	1	-	-
6	Bangunan Kolam (Pembibitan dan Benih)	17	17	-	-
7	Bangunan Gudang Pakan Ikan	3	2	1	-
8	Bangunan Mushollah	1	1	-	-
9	Bangunan Areal Pelelangan Ikan (Kuto Panji)	1	-	-	1
10	Bangunan Bangsal (Kota Kapur)	1	1	-	-
11	Bangunan UPP	1	1	-	-
12	Bangunan Gedung Gudang Perikanan	1	1	-	-
13	Bangunan Gudang Penyimpanan	1	1	-	-
14	Bangunan Gedung Pertemuan	1	1	-	-
15	Bangunan KM/WC (Areal Pelelangan Ikan)	1	1		-
16	Bangunan KM/WC TPI Pesaren Belinyu	1	-	1	-
17	Bangunan Parkir	4	2	1	1
18	Bangunan Pos Jaga	3	3	-	-
19	Garasi Excavator	1	1	-	-
20	Kendaraan Roda Empat	3	3	-	-
21	Kendaraan Roda Dua	19	18	-	1
22	AC	11	11	-	-
23	Komputer PC	11	11	-	-
24	Laptop / Notebook	11	11	-	-
25	Printer	12	12	-	
26	Wireless	1	1	-	-
27	Mesin Rumput	4	4	-	-
28	Genset	4	4	-	-
29	Infocus/ Proyektor	2	1	-	1
30	Scanner	1	1	-	-
31	Televisi	2	2	-	-
32	Kulkas / Lemari Es	2	2	-	-
33	Kipas Angin	4	1	-	3

34	Kamera	3	3	-	-
35	Sound System	1	1	-	-
36	Meja Kerja	22	22	-	-
37	Meja Kerja 1/2 Biro	26	26	-	-
38	Meja Kerja 1 Biro	6	6	-	-
39	Meja Rapat	1	1	-	-
40	Kursi Kerja	5	5	-	-
41	Kursi Kerja Eselon IV	0	0	-	-
42	Kursi Kerja Eselon III	0	0	-	-
43	Kursi Kerja Eselon II	1	1	-	-
44	Kursi Rapat (Plastik)	21	21	-	-
45	Kursi Rapat	169	169	-	-
46	Kursi Tunggu	2	2	-	-
47	Sofa	4	4	-	-
48	Filling Cabinet	33	33	-	-
49	Lemari Arsip	3	3	-	-
51	Almari	5	5	-	-
52	Mesin Pakan Ikan	1	1	-	-
53	Pompa Air	3	3	-	-
54	Tabung Oksigen	5	5	-	-
55	Dispenser	3	3	-	-
56	Papan Informasi	3	3	-	-
57	Kotak saran	1	1	-	-

LAMPIRAN VII

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dinas Perikanan Kabupaten Bangka

SOP ABSENSI DAN DISIPLIN PEGAWAI

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	:	SOP Absensi dan Disiplin Pegawai
2. Jenis Kegiatan	:	Rutin
3. Penanggung Jawab	:	
a. Produk	:	Kadin
b. Kegiatan	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4. Scope (Ruang Lingkup)	:	Dinas Perikanan

B. Identifikasi Kegiatan

Nama Kegiatan	:	SOP Absensi dan Disiplin Pegawai
Langkah Awal	:	Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana membuat lembaran absensi dan Disiplin Pegawai disi daftar hadir dan daftar pulang
Langkah Utama	:	Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana mengumpulkan dan mengetik hasil rekapan absensi dan disiplin Pegawai pada akhir bulan dari absen manual/figer print dan penginputan ke dalam aplikasi Komdanas
Langkah Akhir	:	Penggunaan absensi dan disiplin pegawai dikenakan saksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan berkoordinasi Dinas Terkait

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal :	1	Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana membuat lembaran absensi dan disiplin Pegawai daftar hadir dan daftar pulang
Langkah Utama	2	Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana mengumpulkan dan mengetik hasil rekapan absensi dan disiplin pegawai pada akhir bulan dari absen manual/figer print dan penginputan ke dalam aplikasi Komdanas dan menyerahkan kepada Kasubbag Umum
	3	Kasubag Umum dan Kepegawaian mengoreksi lembaran absensi dan absensi pegawai dan menyerahkan kepada Sekretaris
	4	Sekretairs menyampaikan absensi dan sisiplin pegawai yang telah ditanda tangani Kadin dan menyerahkan ke bagian keuangan bersama data-data pendukung untuk pembayaran uang makan dan remunasi pegawai
Langkah Akhir	5	Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana mengarsipkan dokumen absesi dan disiplin pegawai

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA DINAS PERIKANAN	NOMOR SOP	: 523/003/DINPERKAN/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 16 Januari 2023
	TGL. REVISI	: .....
	TGL. EFEKTIF	: 16 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Drs. Arman NIP. 196810281996011001
	NAMA SOP	: SOP Absensi dan Disiplin Pegawai
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1 Peraturan Daerah Kebupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka 2 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kebupaten Bangka	1 SMA, D3, S1 2 Memiliki Kemampuan Menyusun Program, Kegiatan dan Anggaran 3 Menguasai Operasional Komputer 4 Memahami Peraturan Perundang-undangan	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
	1 Buku Agenda 2 ATK 3 Alat Pengelolah Data, Komputer dan Laptop 4 Printer	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hak pegawai tidak cepet terselesaikan		

IDENTIFIKASI JUDUL SOP
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pemerintahan Kabupaten Bangka
Dinas Perikanan
Sekretariat
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
.....

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi (Kegiatan)	Output	Aspek	Judul SOP
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengkilaian urusan umum, kepegawaian, dan perencanaan dan pelaporan	Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumen dinas	Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi, promosi, mutasi, cuti, Askes, dan Dokuman lain yang berada di Lingkup Dinas Perikanan	Absensi dan Disiplin Pegawai	SOP	SOP Absensi dan Disiplin Pegawai

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FLOWCHART SOP Absensi dan Disiplin Pegawai

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		STAF KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Membuat lembaran absensi dan disiplin pegawai daftar hadir dan daftar pulang mengetik hasil rekapan absensi pada akhir bulan dari absen manual/figer print dan penginputan ke dalam aplikasi Komdanas				lembaran absensi daftar hadir dan daftar pulang	15 Menit	lembaran absensi daftar hadir dan daftar pulang	
2	Mengoreksi lembaran absensi dan disiplin pegawai serta menyerahkan kepada Sekretaris				lembaran absensi	20 Menit	lembaran absensi	
3	Menyampaikan absensi dan disiplin pegawai yang telah ditanda tangani Kadin dan menyerahkan kepada Staf Kepegawaian				lembaran absensi	30 Menit	lembaran absensi	
4	Mengarsipkan dokumen absesi dan disiplin pegawai				Pengarsipan Dokumen	15 Menit	Pengarsipan Dokumen	

SOP ADMINISTRASI KEUANGAN DAN GAJI

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA DINAS PERIKANAN	NOMOR SOP	: 523/ 011 /DINPERKAN/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 16 Januari 2023
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 16 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Drs. ARMAN NIP. 19681028 199601 1 001
	NAMA SOP	: Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1 Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanagan Daearah 3 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuanagan dan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penatasan Usaha Ket Daerah 2 Memiliki Kemampuan dalam Pengelolaan Penatasan Usaha Barang Milik Daerah 3 Memiliki Kemampuan dalam membuat laporan Tentang Aset Daerah
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1 SOP Sekretaris Badan 2 SOP Bidang Anggaran 3 SOP Bidang Perbendaharaan dan Akuntasi	1 Komputer Jaringan Internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai terlambat maka proses pencairan dana /gaji juga akan terlambat	1 Kartu Investaris (KIB) 2 Kartu Invenstaris (KIR)

IDENTIFIKASI JUDUL SOP
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pemerintahan Kabupaten Bangka
Dinas Perikanan
Sekretariat
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi (Kegiatan)	Output	Aspek	Judul SOP
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian,Data PNS, data THL, data jabatan, data PNS/Honorer, data diklat dini, data PNS sedang pendidikan, data diklat pegawai	Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, arsip dan dokumen dinas	Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, membantu Sekretaris Dinas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.	Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai	Pelaksanaan	Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	:	Pelaksanaan Adiministrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai
2. Jenis Kegiatan	:	Rutin
3. Penanggung Jawab	:	
a. Produk	:	Kadin
b. Kegiatan	:	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
4. Scope (Ruang Lingkup)	:	Dinas Perikanan

B. Identifikasi Kegiatan

Nama Kegiatan	:	Pelaksanaan Adiministrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai
Langkah Awal	:	Sekretaris Menugaskan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda untuk melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai
Langkah Utama	:	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai
Langkah Akhir	:	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Membuat surat-surat terkait Administrasi keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai serta menyerahkan kepada Staf

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal :	1	Sekretaris Menugaskan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda untuk melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai
Langkah Utama	2	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai
Langkah Akhir	3	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Membuat surat-surat terkait Administrasi keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai serta menyerahkan kepada Staf

FLOWCHART Pelaksanaan Adiministrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		SEKRETARIS	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	STAF	KADIN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sekretaris Menugaskan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda untuk melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai					Disposisi	5 Menit	Disposisi	
2	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai					Disposisi	10 Menit	Disposisi	
3	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Membuat surat-surat terkait Administrasi keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai serta menyerahkan kepada Staf					Disposisi	10 Menit	Surat-Surat terkait Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai	

SOP PENYUSUNAN RENSTRA

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA DINAS PERIKANAN	NOMOR SOP	: 523/1044/DINPERKAN/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 16 Januari 2023
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 16 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Drs. Arman NIP. 196810281996011001
	NAMA SOP	: Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) di Dinas Perikanan
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kebupaten Bangka 2 Peraturan Daerah Kebupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat	1 SMA, D3, S1 2 Memiliki Kemampuan Menyusun Program, Kegiatan dan Anggaran 3 Menguasai Operasional Komputer 4 Memahami Peraturan Perundang-undangan	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
	1 Dokumen RPJMD 2 ATK 3 Alat Pengelolah Data, Komputer dan Laptop 4 Printer	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyesuaian RENSTRA SKPD ini tidak akan berjalan dengan lancar untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsiSKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan		

IDENTIFIKASI JUDUL SOP
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pemerintahan Kabupaten Bangka
Dinas Perikanan
Sekretariat
JFT Perencana Ahli Muda

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi (Kegiatan)	Output	Aspek	Judul SOP
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan	Melakukan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Dinas pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas dan pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, membantu Sekretaris Dinas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan adimistrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pematauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas	Rencana Strategi (RENSTRA) di dinas perikanan	Penyusunan	Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) di dinas perikanan

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	:	Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) di dinas perikanan
2. Jenis Kegiatan	:	Rutin
3. Penanggung Jawab	:	
a. Produk	:	Kadin
b. Kegiatan	:	JFT Perencana Ahli Muda
4. Scope (Ruang Lingkup)	:	Dinas Perikanan

B. Identifikasi Kegiatan

Nama Kegiatan	:	Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) di dinas perikanan
Langkah Awal	:	Kadin memeriksa surat dari BAPPEDA dan memberi arahan kepada sekretaris untuk menyusun rencana strategis (RENSTRA) di lingkungan Dinas Perikanan
Langkah Utama	:	Sekretaris menerima dan menindak lanjuti membuat format pengumpulan data dan informasi RENSTRA lima tahun dari masing-masing bidang dan seketariat
Langkah Akhir	:	JFU menggandakan dokumen RENSTRA lima tahunan dan membuat surat pengantar pengiriman sekaligus permohonan surat dan menyampaikan kepada BAPPEDA dan mengarsipkan.

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal :	1	Kadin memeriksa surat dari BAPPEDA dan memberi arahan kepada sekretaris untuk menyusun rencana strategis (RENSTRA) di lingkungan Dinas Perikanan
Langkah Utama	2	Sekretaris menerima dan menindak lanjuti membuat format pengumpulan data dan informasi RENSTRA lima tahun dari masing-masing bidang dan sekretariat
	3	Kasubbag Umum menyampaikan format pengumpulan data dan informasi RENSTRA lima tahun kepada masing-masing bidang dan sekretariat
	4	Kasubbag Umum membuat undangan Rapat yang di tanda tangani oleh Kadin kepada penjabat Eselon III di lingkungan dinas perikanan untuk rapat pembahasan rencana strategi (RENSTRA)
	5	Seluruh Kabid melahkukan rapat pembahasan rencana strategi lima tahun
	6	JFU menghimpun format data dan informasi penetapan kinerja (PENJA) dari masing-masing bidang dan sub bagian sekretaris dinas perikanan
	7	Kasubag umum dan kepegawaian menganalisis data dan informasi konsep RENSTRA lima tahunan yang telah terkumpul
	8	Sekretaris membuat konsep dokumen RENSTRA lima tahunan dinas perikanan
	9	Kadin menyampaikan dokumen RENSTRA lima tahunan kepada Kadin untuk memintakan persetujuan oleh kasubbag perencana dan sekretaris untuk menandatangani oleh kepala dinas
	10	Kepala Bidang membuat surat pengantar pengiriman sekaligus permohonan surat
Langkah Akhir	11	JFU menggandakan dokumen RENSTRA lima tahunan dan membuat surat pengantar pengiriman sekaligus permohonan surat dan menyampaikan kepada BAPPEDA dan mengarsipkan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FLOWCHART Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) di dinas perikanan

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		KADIN	SEKDIN	JFT Perencana Ahli Muda	JFU	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KEPALA BIDANG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
1	Memeriksa surat dari BAPPEDA dan memberi arahan kepada Sekretaris untuk menyusun rencana strategis (RENSTRA) di lingkungan Dinas Perikanan							Disposisi Surat	30 Menit	Disposisi Surat	
2	Menerima dan menindak lanjuti membuat format pengumpulan data dan informasi RENSTRA lima tahun dari masing-masing bidang dan sekretariat							Format Pengumpulan DAT RENSTRA lima tahun	45 Menit	Format Pengumpulan DAT RENSTRA lima tahun	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi RENSTRA lima tahun kepada masing-masing bidang dan Sekretariat serta membuat undangan Rapat yang di tanda tangani oleh Kadin kepada penjabat Eselon III di lingkungan dinas perikanan untuk rapat pembahasan rencana strategi							Format Pengumpulan DAT RENSTRA lima tahun dan Undangan Rapat	30 Menit	Format Pengumpulan DAT RENSTRA lima tahun dan undangan rapat	
4	Melahkukan rapat pembahasan rencana strategi lima tahun							Draft usulan PENJA	2jam	Draft usulan PENJA	
5	Menghimpun format data dan informasi penetapan kinerja (PENJA) dari masing-masing bidang dan sub bagian sekretariat dinas perikanan							Draft usulan RENESTRA lima tahun	1 Jam	Draft usulan RENESTRA lima tahun	
6	Menganalisis data dan informasi konsep RENSTRA lima tahunan yang telah terkumpul							Draft usulan RENESTRA lima tahun	1 Jam	Draft usulan RENESTRA lima tahun	
7	Membuat konsep dokumen RENSTRA lima tahunan dinas perikanan							Dokumen RENSTRA lima tahunan	1 Jam	Dokumen RENSTRA lima tahunan	
8	Menyampaikan dokumen RENSTRA lima tahunan kepada Kadin untuk memintakan persetujuan oleh JFT Perencana Ahli Muda dan Sekretaris untuk memandatangani oleh kepala dinas							Dokumen RENSTRA lima tahunan	10 Menit	Dokumen RENSTRA lima tahunan	
9	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus permohonan surat							Konsep surat pengantar	10 Menit	Konsep surat pengantar	
10	Menggandakan dokumen RENSTRA lima tahunan dan membuat surat pengantar pengiriman sekaligus permohonan surat dan menyampaikan kepada BAPPEDA dan mengarsipkan.							Dokumen RENSTRA lima tahunan	10 menit	Dokumen RENSTRA lima tahunan	

SOP PENDAFTARAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PERIKANAN	NOMOR SOP	: 523/ 035 /DINPERKAN/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 16 Januari 2023
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 16 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Drs. Arman NIP 19681028 199601 1 001
	NAMA SOP	: PENDAFTARAN KELOMPOK PEMBUDIDAYAAN IKAN (POKDAKAN)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Memahami tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka 3. Memahami tugas dan fungsi mekanisme Pendaftaran Pokdakan 4. Menguasai teknis usaha pembudidayaan ikan 5. Memiliki dedikasi dan motivasi 6. Memahami permasalahan di lapangan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
- SOP Pengadministrasi Umum	1. Permohonan yang bersangkutan 2. Profil Usaha Pembudidayaan Ikan 3. Berita Acara Kesepakatan Pembentukan POKDAKAN 4. Surat Perintah Tugas dan Laporan Hasil Survey Lapangan 5. Komputer/ Printer/ Scanner/ ATK	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila Dokumen Pendaftaran terlambat diproses/cetak maka pemohon akan melakukan komplain	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

IDENTIFIKASI SOP ADIMISTRASI PEMERINTAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dasar Hukum	:	Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka
Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Bangka
Unit Kerja Eselon I	:	-
Unit Kerja Eselon II	:	Kepala Dinas Perikanan
Unit Kerja Eselon III	:	Kepala Bidang Perikanan Budidaya

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = 6 + 5
A	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di Bidang Perikanan Budidaya	Pelayanan Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN).	Melakukan Verifikasi Kelengkapan Administrasi, melaksanakan survey lapangan dan menyiapkan Dokumen Pendaftaran Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN)	Dokumen Pendaftaran Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN)	Pendaftaran	Pendaftaran Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN)

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1. Judul SOP	:	PENDAFTARAN POKDAKAN
2. Jenis Kegiatan	:	Rutin
3. Penanggung Jawab	:	
a. Produk	:	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka
b. Kegiatan	:	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
4. Scope/ruang lingkup	:	Dinas Perikanan dan Operator Pendaftaran

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Pelayanan Pendaftaran Kelompok Pembudiya Ikan (POKDAKAN)
Langkah Awal	:	Masyarakat/pembudidaya Ikan, mengajukan permohonan pendaftaran Kelompok Pembudiya Ikan (POKDAKAN) kepada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka
Langkah Utama	:	JFT Perikanan Budidaya melakukan verifikasi Kelengkapan Administrasi, melaksakan survey lapangan, menyusun Laporan dan menyiapkan Dokumen Pendaftaran Kelompok Pembudiya Ikan (POKDAKAN).
Langkah Akhir	:	Masyarakat/pembudidaya menerima Dokumen Pendaftaran Kelompok Pembudiya Ikan (POKDAKAN).

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	1. Masyarakat/pembudidaya mengajukan permohonan pendaftaran POKDAKAN dlengkapi persyaratan administrasi kepada Kepala Dinas Perikanan
Langkah Utama	:	2. Kepala Dinas Perikanan memerintahkan Kepala Bidang Perikanan Budidaya untuk melakukan verifikasi permohonan pendaftaran POKDAKAN
		3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya menugaskan JFT Bidang Perikanan Budidaya untuk melakukan kelengkapan berkas permohonan dan melakukan survey lapangan
		4. JFT Bidang Perikanan Budidaya POKDAKAN laporan hasil survey, apabila berkas/syarat lengkap (administrasi, teknis dll) JFT Bidang Perikanan Budidaya menyusun draft/konsep Pendaftaran POKDAKAN kemudian menyerahkan staf untuk mengetik Dokumen Pendaftaran POKDAKAN. Apabila survey tidak memenuhi syarat maka berkas permohonan di kembalikan
		5. Staf/ Operator Komputer mengetik Dokumen Pendaftaran POKDAKAN dan menyerahkannya kepada JFT Bidang Perikanan Budidaya
		6. JFT Bidang Perikanan Budidaya memeriksa, memberi paraf dan menyerahkan Dokumen Pendaftaran kepada Bidang Perikanan Budidaya
		7. Kepala Bidang Perikanan Budidaya memeriksa, memberi paraf dan menyerahkan Dokumen Pendaftaran POKDAKAN kepada Kepala Dinas Perikanan
		8. Kepala Dinas Perikanan menandatangani Dokumen Pendaftaran POKDAKAN, kemudian Dokumen tersebut diserahkan kepada Sekretariat (Pengadministrasi Umum) untuk dilakukan permohonan dan pengesahan
		9. Sekretariat (Pengadministrasi Umum) menyerahkan Dokumen Pendaftaran POKDAKAN kepada Bidang Perikanan Budidaya untuk selanjutnya diserahkan kepada ke Masyarakat/pembudidaya
		10 Kepala Bidang Perikanan Budidaya menyerahkan Dokumen Pendaftaran Pokdakan ke Masyarakat/pembudidaya
Langkah Akhir	:	11 Masyarakat/pembudidaya menerima Dokumen Pendaftaran POKDAKAN

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat/Pembudidaya	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Budidaya	JFT Perikanan Budidaya	Staf/Operator Komputer	Sekretariat (Pengadministrasi Umum)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat/pembudidaya mengajukan permohonan pendaftaran POKDAKAN dlengkapi persyaratan administrasi kepada Kepala Dinas.							Berkas Permohonan Pendaftaran POKDAKAN	30 Menit	Berkas Permohonan Pendaftaran POKDAKAN	Berkas Permohonan Pendaftaran POKDAKAN Terdiri dari: 1) Surat Permohonan Pendaftaran 2) Bel Pengantaran POKDAKAN 3) Dll. Pengauhan dan Verifikasi 4 Foto Dokumen 2x3
2	Kepala Dinas menugaskan Kepala Bidang untuk melakukan verifikasi permohonan pendaftaran POKDAKAN							Berkas Permohonan Pendaftaran POKDAKAN	10 Menit	Berkas Permohonan Pendaftaran POKDAKAN dan disposisi	Berkas Permohonan Pendaftaran POKDAKAN dan disposisi
3	Kabid menugaskan JFT Bidang Perikanan Budidaya untuk melakukan berkas permohonan dan melakukan survey lapangan.							Berkas Permohonan Pendaftaran POKDAKAN dan disposisi	10 Menit	Berkas Permohonan Pendaftaran POKDAKAN dan disposisi	Berkas Permohonan Pendaftaran POKDAKAN dan disposisi
4	JFT Perikanan Budidaya menyusun laporan hasil survey, apabila berkas/syarat lengkap (administrasi, teknis dll) JFT Perikanan Budidaya menyusun draft/konsep Pendaftaran POKDAKAN kemudian menyerahkan staf untuk mengetik Dokumen Pendaftaran POKDAKAN. Apabila survey tidak memenuhi syarat maka berkas permohonan dikembalikan dan dibatalkan							Berkas Permohonan Pendaftaran POKDAKAN dan disposisi	1 Hari	Laporan Hasil Survey	
5	Staf Operator Komputer mengetik Dokumen Pendaftaran POKDAKAN dan menyerahkannya kepada JFT Perikanan Budidaya							Laporan Hasil Survey	20 Menit	Draft Dokumen Pendaftaran POKDAKAN	
6	JFT Perikanan Budidaya memeriksa, memberi paraf dan menyerahkan draft Dokumen Pendaftaran kepada Kabid							Draft Dokumen Pendaftaran POKDAKAN	10 Menit	Paraf pada Draft Dokumen Pendaftaran POKDAKAN	
7	Kabid memeriksa, memberi paraf dan menyerahkan Dokumen Pendaftaran POKDAKAN kepada Kepala Dinas							Paraf pada Draft Dokumen Pendaftaran POKDAKAN	10 Menit	Dokumen Pendaftaran POKDAKAN dengan paraf JFT Perikanan Budidaya dan kabid	
8	Kepala Dinas memeriksa/meneliti Dokumen Pendaftaran POKDAKAN kemudian Dokumen tersebut diserahkan kepada Pengadministrasi Umum untuk dilakukan permohonan dan pengesahan							Dokumen Pendaftaran POKDAKAN dengan paraf JFT Perikanan Budidaya dan kabid	10 menit	Dokumen Pendaftaran POKDAKAN yang telah diperiksa/meneliti dan disetujui oleh Kepala Dinas	
9	Pengadministrasi Umum menyerahkan Dokumen Pendaftaran POKDAKAN kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya							Dokumen Pendaftaran POKDAKAN yang telah diperiksa/meneliti dan disetujui oleh Kepala Dinas	10 menit	Kepala Bidang Perikanan Budidaya menerima/menyerahkan kepada masyarakat/pembudidaya	
10	Kepala Bidang Perikanan Budidaya menyerahkan dokumen surat Pendaftaran dan pengesahan Dokumen Pendaftaran Pokdakan ke masyarakat/pembudidaya							Kepala Bidang Perikanan Budidaya menerima/menyerahkan kepada masyarakat/pembudidaya	10 menit	Menyerahkan Dokumen Pendaftaran POKDAKAN kepada masyarakat/pembudidaya	
11	Masyarakat/Pembudidaya menerima Dokumen Pendaftaran POKDAKAN							Menyerahkan Dokumen Pendaftaran POKDAKAN kepada Masyarakat/Pembudidaya	10 menit	Menerima Dokumen POKDAKAN dari Bidang Perikanan Budidaya	

SOP PENDAFTARAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR (POLAKSAR)

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PERIKANAN	NOMOR SOP	: 523/ 057 /DINPERKAN/2023
	TGL. PEMBUATAN	: 5 Januari 2023
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Drs. Arman NIP 19681028 199601 1 001
	NAMA SOP	: PENDAFTARAN POKLAHSAR

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka. 2. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Memahami tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka 3. Memahami tugas dan fungsi mekanisme Pendaftaran POKLAHSAR 4. Menguasai teknis usaha pegolahan dan pemasaran hasil perikanan 5. Memiliki dedikasi dan motivasi 6. Memahami permasalahan di lapangan
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
Data Statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Permohonan yang bersangkutan 2. Profil usaha pegolahan dan pemasaran hasil perikanan 3. Berita Acara Kesepakatan Pembentukan POKLAHSAR 4. Surat Perintah Tugas dan Laporan Hasil Survey Lapangan 5. Komputer/ Printer/ Scanner/ ATK
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila Dokumen Pendaftaran terlambat diproses/ cetak maka pemohon akan melakukan komplain	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

IDENTIFIKASI SOP ADIMISTRASI PEMERINTAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dasar Hukum	:	Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Tipe A Kabupaten Bangka
Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Bangka
Unit Kerja Eselon I	:	-
Unit Kerja Eselon II	:	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka
Unit Kerja Eselon III	:	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Unit Kerja JFT	:	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = 6 + 5
A	Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pendataan dan pengevaluasian kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Menyiapkan bahan pengawasan, monitoring Evaluasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR	Pendaftaran	Pendaftaran POKLAHSAR

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	PENDAFTARAN POKLAHSAR
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Dinas
	b. Kegiatan	:	Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
4.	Sasaran/Hasil Tingkat	:	Pendaftaran

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Pendaftaran POKLAHSAR
Langkah Awal	:	Masyarakat/ pengolah dan pemasar hasil perikanan mengajukan permohonan pendaftaran POKLAHSAR kepada Kepala Dinas.
Langkah Utama	:	JFT Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan memverifikasi administrasi pendaftaran POKLAHSAR, membuat draft dan menugaskan staf untuk mengetik Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR.
Langkah Akhir	:	Pemohon menerima Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR.

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	1. Masyarakat/ pengolah dan pemasar hasil perikanan mengajukan permohonan pendaftaran POKLAHSAR dilengkapi persyaratan administrasi kepada Kepala Dinas.
Langkah Utama	:	2. Kepala Dinas menugaskan Kepala Bidang untuk melakukan verifikasi permohonan pendaftaran POKLAHSAR.
		3. Kabid menugaskan JFT Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk memilli kelengkapan berkas permohonan dan melakukan survey lapangan.
		4. JFT Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyusun laporan hasil survey, apabila berdasarkan hasil survey POKLAHSAR tersebut memenuhi persyaratan (administrasi, teknis dll) JFT Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyusun draft/konsep Pendaftaran POKLAHSAR kemudian menugaskan staf untuk mengetik Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR.
		5. Staf/ Operator Komputer mengetik Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR dan menyerahkannya kepada JFT Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
		6. JFT Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan memeriksa, membert paraf dan menyerahkan Dokumen Pendaftaran kepada Kabid.
		7. Kabid memeriksa, membert paraf dan menyerahkan Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR kepada Sekretaris.
		8. Sekretaris memeriksa, membert paraf dan menyerahkan Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR kepada Kepala Dinas.
		9. Kepala Dinas menandatangani Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR, selanjutnya Dokumen tersebut diserahkan kepada sekretariat untuk dilakukan pemeriksaan dan penggandaan.
		10. Sekretariat menyerahkan Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR kepada Bidang untuk selanjutnya diserahkan kepada ke pemohon.
Langkah Akhir	:	11. Pemohon menerima Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	JFT Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Operator Komputer	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berkas Pemohon Pendaftaran POKLAHSAR masuk ke Kadis dan didisposisi ke Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk diproses lebih lanjut					Berkas Permohonan Pendaftaran POKLAHSAR	1 Menit	Berkas Permohonan Pendaftaran POKLAHSAR	Berkas Permohonan Pendaftaran POKLAHSAR
2	Kabid mendisposisikan berkas pemohon ke JFT Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					Berkas Permohonan Pendaftaran POKLAHSAR	10 Menit	Berkas Permohonan Pendaftaran POKLAHSAR	Disposisi
3	Kabid menugaskan JFT Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk melakukan survey lapangan dan menyusun konsep					Surat Perintah Tugas	1 Hari	Laporan Hasil Survey	Survey Kegiatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4	Kasi menugaskan operator komputer untuk mengetik Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR					Konsep	15 Menit	Draft Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR	Pengetikan Sesuai Format
5	Operator memberikan Draft Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR yang sudah diproses ke JFT Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Kabid untuk dicek dan diparaf sebelum diteruskan kepada Kepala Dinas					Draft Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR	10 Menit	Paraf pada Draft Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR	Paraf JFT Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Kabid
6	Kadis melakukan penandatanganan Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR					Draft Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR	10 Menit	Dokumen Pendaftaran POKLAHSAR yang telah ditandatangan	Penandatangan Dokumen oleh Kadis dan selanjutnya Penomoran dan Pengarsipan serta penyerahan kepada pemohon/POKLAHSAR

SOP PENGAWASAN KEPATUHAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

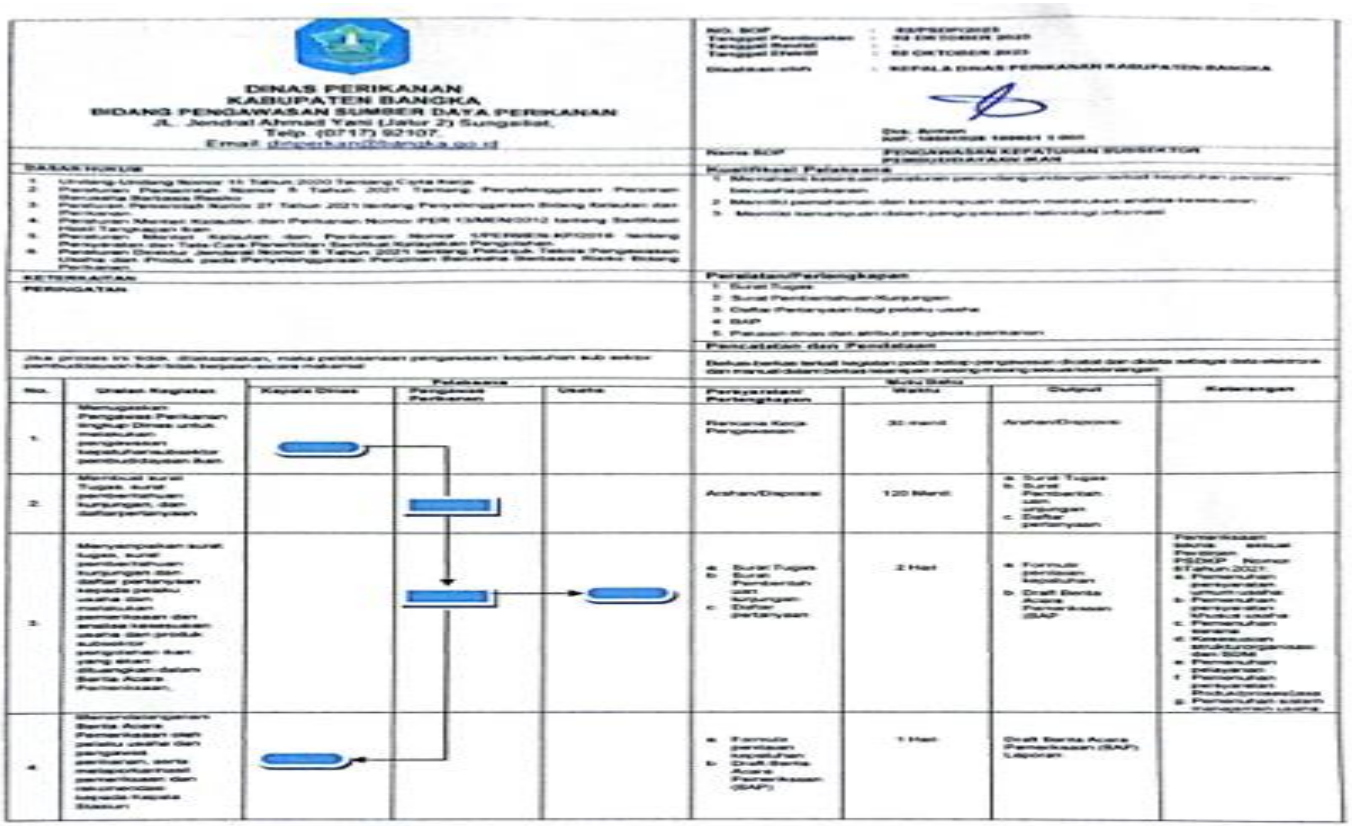

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGKA
BIDANG PENGAWASAN SUMBER DATA PERIKANAN
Jl. Jendral Ahmad Yani (Jalur 2) Sungailat,
Telp. (0717) 92107
Email: dinperikan@bangka.go.id

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana: Kepala Dinas	Pelaksana: Pengawas Perikanan	Pelaksana: Usaha	Perlengkapan/Perlengkapan	Waktu Baku: Waktu	Output	Keterangan
1.	Menugaskan Pengawas Perikanan lingkup Dinas untuk melakukan pengawasan kepatuhan usaha pembudidayaan ikan.				Rencana Kerja Pengawasan	30 menit	Arahan/Disposisi	
2.	Membuat surat tugas, surat pemberitahuan kunjungan, dan daftar pertanyaan				Arahan/Disposisi	120 Menit	a. Surat Tugas b. Surat Pemberitahuan kunjungan c. Daftar pertanyaan	
3.	Menyampaikan surat tugas, surat pemberitahuan kunjungan dan daftar pertanyaan kepada pelaku usaha dan melakukan pemeriksaan dan analisa kepatuhan usaha dan produk budidaya pengawasan ikan yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.				a. Surat Tugas b. Surat Pemberitahuan kunjungan c. Daftar pertanyaan	2 Hari	a. Formulir pemeriksaan kepatuhan b. Draft Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Pemeriksaan berdasar Permen PSDKP Nomor 8 Tahun 2021: a. Pemenuhan persyaratan umum usaha b. Pemenuhan persyaratan khusus usaha c. Pemenuhan sarana d. Kesesuaian struktur organisasi dan SDM e. Pemenuhan pelaporan f. Pemenuhan persyaratan Produk/Jasa g. Pemenuhan sistem manajemen usaha
4.	Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan oleh pelaku usaha dan pengawas perikanan, serta melaporkannya dan rekomendasi kepada Kepala Bidang				a. Formulir pemeriksaan kepatuhan b. Draft Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	1 Hari	Draft Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Laporan	